

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR BERPENGARUH TERHADAP RENDAHNYA PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017

(Studi Kasus Kampung Bumi Dipasena Agung Kecamatan Rawajitu Timur
Kabupaten Tulang Bawang)

Oleh

Dian Fernando Sihite

Jumlah perempuan di Kampung Bumi Dipasena Agung yang terdaftar ke dalam DPT pada Pilkada Tulang Bawang 2017 sebanyak 1.115 orang namun yang berpartisipasi hanya 225 orang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor berpengaruh terhadap rendahnya partisipasi politik perempuan Kampung Bumi Dipasena Agung pada Pilkada Tulang Bawang 2017. Dari 1.115 orang populasi diambil sampel 91 orang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, data dan informasi diperoleh dengan menggunakan kuisioner, wawancara, dan dokumentasi, kemudian data melalui proses editing, koding dan tabulasi. Analisis data dilakukan dengan *software* SPSS 24 untuk menguji validitas dan reliabilitas data, uji korelasi, serta uji regresi, sedangkan pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t. Analisis data menghasilkan koefisien regresi faktor pendidikan sebesar -0,015 dengan signifikansi 0,936 dan faktor kinerja Pemerintah Tulang Bawang -0,039 dengan signifikansi 0,787. Artinya faktor pendidikan dan faktor kinerja Pemerintah Tulang Bawang tidak berpengaruh signifikan terhadap partisipasi politik perempuan di Kampung Bumi Dipasena Agung dalam Pilkada Tulang Bawang 2017. Koefisien regresi faktor sosial ekonomi 0,457 dengan signifikansi 0,020 serta faktor citra kandidat dan partai politik sebesar 0,227 dengan signifikansi 0,008, nilai KD keduanya sebesar 0,154. Artinya faktor sosial ekonomi serta faktor citra kandidat dan partai politik berpengaruh terhadap partisipasi politik perempuan di Kampung Bumi Dipasena Agung dalam Pilkada Tulang Bawang 2017 sebesar 15,4% keduanya signifikan. Selain itu faktor teknis seperti kesalahan DPT, tidak mendapat undangan, tidak mengurus Form-A5, tidak memiliki KTP, jarak TPS yang terlalu jauh, serta faktor konflik dengan perusahaan menjadi salah satu penyebab rendahnya partisipasi politik perempuan di Kampung Bumi Dipasena Agung.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Perempuan

ABSTRACT

INFLUENTIAL FACTORS TOWARD LOW POLITICAL PARTICIPATION OF WOMEN ON THE ELECTION OF REGIONAL HEADS IN 2017

(Case of Bumi Dipasena Agung Village, Rawajitu Timur, Tulang Bawang)

By:

Dian Fernando Sihite

The amount of woman in Bumi Dipasena Agung Village that registered in DPT Pilkada Tulang Bawang 2017 is 1.115, but only 225 people participated. This research was aimed to study the influential factors towards low political participation of women in Bumi Dipasena Agung village on Pilkada Tulang Bawang 2017. Out of 1.115 peoples population, 91 peoples was taken to became samples. The method used in this study is quantitative methods, data and information by using questionnaires, interviews, and documentation, then the data pass through the process of editing, coding and tabulation. Data was analyzed by software of SPSS 24 to study the validity and reliability, correlation test, regression test, while hypothesis analysis was studied by t-test. Data analysis resulted regression coefficient of education factor equal to -0,015 with significance 0,936 and performance of Tulang Bawang Government is -0.039 with significance 0,787. It means that the factors of education and performance of Tulang Bawang Government did not affect to woman's political participation in Bumi Dipasena Agung village significantly. Regression coefficient of social economic factor equal to 0.457 with significance 0.020, also image of candidate and political parties factor equal to 0.227 with significance 0.008, both KD value was 0.154. It means that those factors affected to woman's political participation in Bumi Dipasena Agung significantly, with a percentage 15.4%. Other than that, technical factors like DPT errors, did not get invitation, did not administer the Form-A5, did not have E-KTP, the distance of TPS that is too far, and conflict factor with the company became one of cause low political participation of women in Bumi Dipasena Agung Village.

Keywords : Political Participation, Woman

**FAKTOR FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP RENDAHNYA
PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN
KEPALA DAERAH TAHUN 2017
(Studi Kasus Kampung Bumi Dipasena Agung Kecamatan Rawajitu Timur
Kabupaten Tulang Bawang)**

Oleh
Dian Fernando Sihite

Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018

Judul Skripsi

**: FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH
TERHADAP RENDAHNYA PARTISIPASI
POLITIK PEREMPUAN DALAM
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN
2017 (Studi Kasus Kampung Bumi
Dipasena Agung Kecamatan Rawajitu
Timur Kabupaten Tulang Bawang)**

Nama Mahasiswa

: Dian Fernando Sihite

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1216021035

Jurusan

: Ilmu Pemerintahan

Fakultas

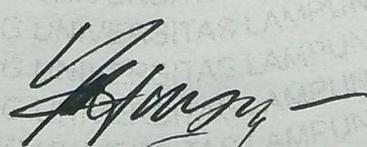
: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

Dr. Ari Darmastuti, M.A.
NIP 19600416 198603 2 002

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 19611218 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Dr. Ari Darmastuti, M.A.**



Penguji Utama

: **Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarifet Makhya

NIP 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **10 Januari 2018**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 10 Januari 2018

Yang Membuat Pernyataan



Dian Fernando Sihite

NPM. 1216021035

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Dian Fernando Sihite, anak pertama dari dua bersaudara. Orang tua bernama M. Sihite (alm) dan S. Simamora, penulis dilahirkan di Giham Sukamaju Lampung Barat pada 21 Desember 1994.

Pendidikan pertama penulis tempuh di Taman Kanak-kanak Darma Wanita Giham Sukamaju yang diselesaikan pada 2001, dilanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 01 Giham Sukamaju , Kab. Lampung Barat diselesaikan pada 2006. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama Bhakti Baradatu, Kab. Waykakan dan diselesaikan pada 2009, kemudian dilanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Gajah Mada Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2012. Pada Tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Universitas Lampung Jurusan Ilmu Pemerintahan melalui jalur penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

MOTTO

:):
You Decide

PERSEMBAHAN

Dengan Segala Kerendahan Hati Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada :

*Mama
(S. Simamora)*

*Adik
(Elsa Inriyani Sihite)*

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan berkat-Nya skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi yang Berjudul “Faktor Faktor yang Berpengaruh Terhadap Rendahnya Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2017 (Studi Kasus Kampung Bumi Dipasena Agung Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang)” merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. Syarief Makhya, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Drs. R Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan sekaligus penguji atas kesediannya memberikan saran, dan kritik kepada penulis.
4. Dr. Ari Darmastuti, M.A., selaku Pembimbing Skripsi atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.

5. Drs. Aman Toto Dwijono M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan membantu penulis selama menjadi mahasiswa.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
7. Seluruh Staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
8. Perangkat Kampung dan Masyarakat Kampung Bumi Dipasena Agung yang telah bersedia membantu penulis dalam melaksanakan penelitian.
9. Teman-teman yang telah bertugas di seminar usul dan hasil penulis, penulis ucapkan terimakasih
10. Teman-teman sangkatan yang telah mendahului penulis, terima kasih atas motivasi dan dukungannya selama penulis menjalani masa perkuliahan.
11. Saudara-saudara Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Lampung yang telah membantu dan menemani jalan penulis dalam proses berorganisasi dan berpelayanan.
12. Teman-teman 212 yang selalu ada dan menemani penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
13. Kelompok Kuliah Kerja Nyata dan masyarakat Desa Pekonmon yang telah membantu proses Kuliah Kerja Nyata penulis.
14. Teman-teman Banana Rolling yang kadang ada menemani penulis bermain sepatu roda.
15. Teman-teman sejawat dan teman sepergaulan yang tidak dapat disebutkan sat- persatu, terimakasih atas pertemanan yang membangun dan pergaulan yang baik.
16. Fans yang selalu mendukung dan mengagumi penulis.
17. Keluarga yang selalu memotivasi dan membimbing penulis hingga saat ini.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Akan tetapi, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi penelitian selanjutnya.

Bandar Lampung, Januari 2018
Penulis

Dian Fernando Sihite

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
II. KAJIAN PUSTAKA	9
A. Partisipasi Politik	9
1. Pengertian Partisipasi Politik	9
2. Bentuk-Bentuk Partisipasi	12
3. Motif-Motif Partisipasi	19
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi politik	21
a. Faktor Latar Belakang Sosial-ekonomi	22
b. Faktor Kekecewaan Pada Realitas Pemerintah dan Politik ..	23
B. Partisipasi Politik Perempuan	25
C. Pemilihan Kepala Daerah Serentak	32
D. Kerangka Pikir	36
E. Hipotesis	38
III. METODOLOGI PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Variabel Penelitian	40
C. Definisi Konseptual	42

D. Definisi Oprasional	43
E. Lokasi Penelitian	48
F. Populasi dan Sampel	48
1. Populasi	48
2. Sampel	48
G. Jenis Data	48
1. Data Primer	49
2. Data Sekunder	50
H. Teknik Pengumpulan Data	50
1. Kuesioner	50
2. Wawancara	51
3. Dokumentasi	51
I. Teknik Pengolahan Data	51
1. Editing	51
2. Koding	51
3. Tabulating	51
4. Interpretasi Data	52
J. Teknik Penentuan Skor	52
K. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	52
1. Uji Validitas Instrumen	52
2. Uji Reliabilitas Instrumen	52
L. Teknik Analisis Data	53
1. Uji Parsial	53
a. Uji Korelasi	53
b. Uji Regresi	53
M. Uji Hipotesis	54

IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN..... 55

A. Sejarah Singkat Dipasena	55
B. Kondisi Geografis	57
C. Kondisi Demografi	59
1. Distribusi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	59
2. Distribusi Penduduk Berdasarkan Agama	59
3. Distribusi Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan	61
4. Distribusi Penduduk Menurut Kelompok Usia.....	61
D. Struktur Organisasi Pemerintah Kampung Bumi Dipasena Agung tahun 2017	63
E. Kandidat Calon Kepala Daerah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tulang Bawang 2017.....	64
F. Hasil Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah Tulang Bawang 2017 ..	64

V HASIL DAN PEMBAHASAN	65
A. Deskripsi Karakteristik Responden	65
1. Karakteristik Responden Berdasarkan Kelompok Usia.....	65
2. Karakteristik Responden Berdasarkan Mata Pencarian/Pekerjaan	66
B. Hasil Uji Validitas dan Reabilitas Instrumen Penelitian	67
1. Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian	68
2. Hasil Uji Realibilitas Instrumen Penelitian	70
C. Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Perempuan	70
1. Deskripsi Variabel Sosial Ekonomi Perempuan Kampung Bumi Dipasena Agung Dalam Pilkada 2017	70
2. Deskripsi Variabel Pendidikan Perempuan Kampung Bumi Dipasena Agung Dalam Pilkada 201	72
3. Deskripsi Variabel Kinerja Pemerintah Tulang Bawang.....	72
4. Deskripsi Variabel Citra Kandidat dan partai politik Dalam Pilkada 2017	75
5. Deskripsi Variabel Partisipasi Politik Perempuan Kampung Bumi Dipasena Agung Dalam Pilkada 2017	83
6. Pengaruh Faktor X Terhadap Faktor Y	89
7. Faktor Sosial Ekonomi Berpengaruh Terhadap Partisipasi Politik Perempuan	100
8. Faktor Citra Kandidat dan Partai Politik Berpengaruh Terhadap Partisipasi Politik Perempuan	102
9. Faktor Lain Penyebab Rendahnya Partisipasi Politik Perempuan Kampung Bumi Dipasena Agung pada Pilkada Tulang Bawang Tahun 2017.....	105
a. Konflik Plasma (Petambak) dengan Inti (Perusahaan).....	105
b. Faktor Teknis	111
VI SIMPULAN DAN SARAN	114
A. Simpulan.....	114
B. Saran	116

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal.
1. Piramida Partisipasi Politik	18
2. Bagan Kerangka Pikir	38
3. Bagan Hubungan Antar Variabel	41
4. Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung Bumi Dipasena Agung Tahun 2017	63

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal.
1. Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilu Serentak 9 Desember 2015 Di Provinsi Lampung	5
2. Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilu Serentak 15 Februari 2017 Di Provinsi Lampung	6
3. Definisi Partisipasi Politik Menurut Ahli	9
4. Negara-Negara Yang Telah Memberikan Hak Pilih Kepada Perempuan	27
5. Definisi Operasional	46
6. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	59
7. Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama	60
8. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan	61
9. Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia	62
10. Daftar Nama Calon Kepala Daerah Beserta Partai Pengusung Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tulang Bawang 2017	64
11. Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tulang Bawang 2017	64
12. Distribusi Responden Menurut Kelompok Usia di Kampung Bumi Dipasena Agung	66
13. Distribusi Responden Menurut Mata Pencarian di Kampung Bumi Dipasena Agung	67
14. Uji Validitas	68

15. Uji Reliabilitas	70
16. Jabatan Organisasi yang Dimiliki Responden	71
17. Pendapatan Dihasilkan Responden Per-Bulan	71
18. Jenjang Pendidikan Formal Responden	72
19. Pendapat Responden Tentang Pelayanan Publik Yang Diberikan PemerintahTulang Bawang Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat.....	72
20. Pendapat Responden Tentang Pembangunan yang Diberikan Pemerintah Tulang Bawang Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat	73
21. Pendapat Responden Tentang Pembinaan yang Diberikan Pemerintah Tulang Bawang Sesuia Dengan Kebutuhan Masyarakat	74
22. Pendapat Responden Tentang Pemerintah Tulang Bawang Dapat Dipercaya	75
23. Pendapat Responden Tentang Partai Pengusung Kandidat Calon Kepala Daerah Dapat Mempengaruhi Pilihan Masyarakat.....	75
24. Pendapat Responden Tentang Keharusan Kandidat Calon Kepala Daerah Merupakan Kader Partai Politik.....	76
25. Pendapat Responden Tentang Mempercayai Partai Politik	77
26. Pendapat Responden Tentang Dikenalnya Kandidat Calon Kepala Daerah Oleh Masyarakat	77
27. Pendapat Responden Tentang Pengaruh Penampilan Kandidat Calon Kepala Dearah Terhadap Pilihan Masyarakat.....	78
28. Pendapat Responden Tentang Prestasi Membanggakan Yang Dimiliki Kandidat Calon Kepala Daerah	79
29. Pendapat Responden Tetang Gaya Politik Kandidat Calon Kepala Daerah Disukai Masyarakat	79
30. Pendapat Responden Tentang Kedekatan Emosional Kandidat Calon Kepala Daerah Dengan Masyarakat.....	80

31. Pendapat Responden Tentang Latar Belakang Kandidat Calon Kepala Daerah Disukai Masyarakat	81
32. Pendapat Responden Tentang Kemampuan Kandidat Calon Kepala Daerah Dalam Memimpin Memadai	81
33. Pendapat Responden Tentang Kandidat Calon Kepala Daerah Tulang Bawang Dalam Pemilu 2017 Dapat Dipercaya	82
34. Pendapat Responden Tentang Perubahan Dapat Terjadi Dengan Berpartisipasi Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tulang Bawang	83
35. Pendapat Responden Tentang Berpartisipasi Dalam Pemilihan Umum	83
36. Keikutsertaan Responden Dalam Pemberian Suara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tulang Bawang 2017	84
37. Pendapat Responden Tentang Hadir Dalam Proses Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Tulang Bawang Dapat Menciptakan Pemilu yang Jujur	85
38. Kehadiran Responden Dalam Proses Perhitungan Suara Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Tulang Bawang 2017	85
39. Pendapat Responden Tentang Menjadikan Masyarakat Sebagai Donatur Kampanye Dalam Pemilihan Umum Dapat Menciptakan Transparansi Sumber Dana Kampanye	86
40. Keikutsertaan Responden Menjadi Donatur Kampanye Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tulang Bawang 2017	87
41. Pendapat Responden Tentang Tim Sukses t Calon Kepala Daerah Masyarakat Memperoleh Pendidikan Politik	87
42. Keikutsertaan Responden Menjadi Tim Sukses Salah Satu Calon Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tulang Bawang 2017	88
43. Pendapat Responden Tentang Menjadi Panitia Pemilihan Umum Adalah Hak dan Kewajiban Sebagai Warga Negara	88
44. Keikutsertaan Responden Menjadi Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tulang Bawang 2017	89

45. Korelasi Antara Faktor X Dengan Faktor Y	89
46. Koefisien Determinasi Variabel X.....	92
47. Uji Koefisien Regresi Faktor Status Sosial.....	93

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek demokrasi yang menentukan kualitas demokrasi suatu negara. Tingginya partisipasi menunjukkan bahwa warga masyarakat memahami dan antusias dalam kegiatan politik. Warga masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam proses politik terdorong oleh keyakinan bahwa kegiatan mereka memiliki efek politik terselurnya kepentingan atau setidaknya akan mempengaruhi kebijakan. Sehingga sosialisasi politik menjadi sangat penting untuk dilakukan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat dan memunculkan kesadaran politik.

Subiakto dan Ida (2012:65) mengungkapkan bahwa di Indonesia khususnya daerah pedesaan masih mempunyai literasi politik dan partisipasi politik yang rendah. Sementara media massa Indonesia yang diharapkan mampu menjadi media sosialisasi politik, dan persoalan-persoalan sosial, ekonomi, budaya kepada masyarakat, telah menjadi alat politik dan dikuasai oleh kepentingan. Sehingga informasi, data, dan fakta yang diterima masyarakat tentang isu politik menjadi bias. Hal ini mengakibatkan banyaknya masyarakat tidak peduli dan bersikap pasif atau apatis.

Penelitian tentang partisipasi politik yang dilakukan oleh Lipset dikutip dari Miriam Budiardjo (1982:8) didasarkan pada pemilihan umum di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa barat seperti Jerman, Swedia, Norwegia, dan Finlandia menemukan bahwa di negara-negara tersebut orang kota lebih banyak memberikan suara dari pada orang desa. Mereka yang berumur antara 35 dan 55 lebih banyak dari pada yang usianya di bawah 35 tahun ataupun yang usianya di atas 55 tahun lebih banyak dari pada yang belum menikah. Pendapatan, pendidikan dan status juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi tingginya partisipasi, atau dengan kata lain orang yang berpendapatan tinggi, berpendidikan baik, dan yang berstatus sosial tinggi cenderung lebih banyak berpartisipasi dari pada orang yang berpendapatan serta pendidikannya rendah

Penelitian tentang partisipasi politik yang dilakukan oleh Verba dan Nie dikutip dari Miriam Budiardjo (2007:374) berdasarkan pemilihan umum di Amerika Serikat menemukan bahwa, 22% masyarakat Amerika yang terdiri dari tingkat sosial-ekonomi rendah, berkulit hitam, perempuan, orang tua dan pemuda sama sekali tidak aktif dalam kehidupan politik. Sebanyak 21% spesialis pemilih (*voting specialists*) yaitu orang yang hanya aktif memberikan suara terdiri dari tingkat sosial-ekonomi rendah perkotaan. Komunalis (*communalists*) persentasenya sebanyak 20% yaitu orang-orang yang bekerja sama dengan pemerintah untuk menangani isu-isu terkini, mereka memilih namun tidak ingin terlibat langsung dalam kampanye terdiri dari masyarakat kelas sosial-ekonomi atas. Sisanya adalah orang-orang yang berpartisipasi penuh dalam kampanye, pengurus partai politik, dan sebagainya. Menggunakan hak pilih dalam pemilihan

umum bukan merupakan satu-satunya bentuk partisipasi politik, namun angka partisipasi yang didapat dari pemilihan umum hanya memberikan gambaran kasar mengenai partisipasi.

Penelitian tentang partisipasi politik di luar dari pemberian hak suara pada pemilihan umum dilakukan oleh Almond dan Verba dituangkan dalam karya klasik berjudul *Civic Culture* dan *The Civic Culture Revisited* dalam buku Miriam Budiardjo (2007:376). Dalam bukunya Almond dan Verba menyatakan bahwa bila dibandingkan dengan warga di beberapa negara Eropa Barat, warga Amerika tidak terlalu bergairah untuk memberikan hak pilihnya pada pemilihan umum. Akan tetapi mereka lebih terfokus dan aktif dalam pemecahan berbagai masalah masyarakat dan lingkungan melalui kegiatan organisasi.

Tingkat partisipasi yang berbeda-beda dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya umur, jenis kelamin, status ekonomi dan sosial, pendidikan, serta pekerjaan faktor-faktor ini juga dipengaruhi penggunaan media massa. Graber (2012:63) menyatakan bahwa masyarakat miskin dan kurang berpendidikan lebih suka televisi dan radio karena menyajikan hiburan yang ringan dan menyenangkan, sedangkan keluarga mapan dan berpendidikan tinggi cenderung menggunakan media massa semakin banyak dan bervariasi. Masyarakat terpelajar dan mapan lebih sadar akan pengaruh pemerintah terhadap kehidupan mereka, mereka juga memperoleh lebih banyak informasi tentang proses-proses politik dan lebih kompeten dalam tingkahlaku politiknya.

Prilaku warga negara dalam pemilihan umum adalah bentuk partisipasi yang mudah diukur intensitasnya, melalui perhitungan persentase orang yang

menggunakan hak pilihnya (*voter turnout*) dibagi dengan jumlah seluruh warga negara yang berhak memilih. Dalam konteks pemilihan umum partisipasi pemilih merupakan isu penting karena berkaitan dengan seberapa banyak warga masyarakat hadir untuk memberikan suara mereka dan seringkali dihubungkan dengan legitimasi hasil pemilu. Partisipasi pemilih juga berkaitan dengan kepercayaan warga masyarakat pada penyelenggara pemilu dan pihak yang akan memimpin pemerintahan.

Partisipasi politik perempuan merupakan salah satu isu politik yang penting di Indonesia mengingat bahwa perempuan merupakan pemberi suara terbesar dalam pemilihan umum. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 menurut hasil SUSPAS 2015 adalah 255.182.144 juta jiwa, 126.950.255 juta jiwa diantaranya adalah perempuan. Dari 126.950.255 juta jiwa perempuan Indonesia tersebut 87.994.905 juta jiwa berumur 17 tahun ke atas yang artinya 87.994.905 juta jiwa perempuan memiliki hak suara pada pemilihan umum, jumlah ini lebih banyak 694.654 ribu jiwa bila dibandingkan dengan laki-laki yang berumur 17 ke atas yaitu 87.300.251 juta jiwa.

Jumlah penduduk perempuan yang banyak di Indonesia tidak disertai dengan tingginya partisipasi politik perempuan. Partisipasi politik perempuan masih hanya sebatas memberikan suara dalam pemilu, keterlibatan perempuan dalam dunia politik memang menunjukkan *trend* naik tetapi tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Subiakto dan Ida (2012:158) menyatakan bahwa kondisi ini dipengaruhi oleh opini publik terhadap eksistensi perempuan dalam dunia politik

yang kurang mendukung. Prilaku pemilih perempuan juga tidak memberikan dukungan kepada calon kepala daerah perempuan yang ada.

Daerah-daerah di Indonesia umumnya penganut budaya patriarki yang kuat salah satunya adalah Lampung. Di Provinsi Lampung partisipasi politik perempuan mulai menunjukkan peningkatan tercatat ada dua Kepala Daerah perempuan di Provinsi Lampung. Bupati Kabupaten Lampung Timur Chusnunia Chalim hasil dari Pemilukada serentak 2015 dan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Winarti hasil dari Pemilukada serentak 2017. Partisipasi perempuan yang meningkat ini tetap saja belum menunjukkan peningkatan yang signifikan apa lagi bila dibandingkan dengan banyaknya jumlah perempuan. Tabel berikut ini merupakan angka partisipasi politik perempuan Provinsi Lampung pada Pemilukada serentak tahun 2015 dan tahun 2017.

Tabel 1. Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilukada Serentak 9 Desember 2015 Di Provinsi Lampung.

No.	Kota/Kabupaten	Pemilih	<i>Voter Turn Out</i>	Partisipasi (%)
1.	Bandar Lampung	314.832	215.772	68,6
2.	Lampung Timur	392.767	253.490	64,8
3.	Lampung Tengah	454.219	300.248	66,1
4.	Lampung Selatan	355.760	250.274	70,4
5.	Pesawaran	163.238	116.959	71,6
6.	Way Kanan	152.952	104.741	68,5
7.	Kota Metro	53.212	40.574	76,2
8.	Pesisir Barat	46.291	34.449	74,4

Sumber : <https://pilkada2015.kpu.go.id/> (Diolah peneliti)

Tabel 2. Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilu Serentak 15 Februari 2017 Di Provinsi Lampung.

No.	Kota/Kabupaten	Pemilih	Voter Turn Out	Partisipasi (%)
1.	Tulang Bawang Barat	96.049	83.986	87,4
2.	Lampung Barat	99.693	75.634	75,9
3.	Tulang Bawang	133.290	85.501	65,6
4.	Pringsewu	155.592	105.820	68
5.	Mesuji	67.514	49.908	73,9

Sumber : <https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil> (Diolah peneliti)

Dari table 1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 angka partisipasi politik perempuan tertinggi adalah Kota Metro dengan 76,2% dan terendah Kabupaten Lampung Timur 64,8%. Tahun 2017 angka partisipasi politik perempuan tertinggi adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat 87,4% dan terendah Kabupaten Tulang Bawang 65,6%. Partisipasi politik perempuan di tiap kecamatan ataupun tiap kelurahan pada Pemilu serentak tahun 2015 rata-rata masih di atas 50%, namun pada Pemilu serentak tahun 2017 ada kecamatan dan kelurahan dengan angka partisipasi di bawah 50% yaitu Kecamatan Rawajitu Timur dengan partisipasi 45,8% bahkan Partisipasi perempuan di Kampung Bumi Dipasena Agung hanya 22,6 %. (sumber: kpu.go.id diakses pada 20 Februari 2017)

Partisipasi politik perempuan di Kampung Bumi Dipasena Agung seperti yang telah disebutkan sebelumnya hanya 22,6 %, tercatat 1.115 warga perempuan Kampung Bumi Dipasena Agung merupakan pemilih tetap yang tersebar di 5 TPS tetapi hanya 252 orang yang menggunakan hak suaranya. Keadaan ini menjadi sebuah masalah yang layak untuk dikaji karena partisipasi politik bukan hanya tentang sebuah angka, namun lebih dari itu partisipasi merupakan sebuah

legitimasi dan bentuk kepercayaan warga masyarakat terhadap penyelenggara, partai politik, dan para calon kepala daerah. Terkait dengan penelitian ini terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan di Kota Bandar Lampung yang cukup relevan dengan penelitian ini, yaitu:

Yanfran Zilta Arwandi (2005) Hubungan Jenjang Pendidikan Dengan Partisipasi Politik (Studi pada Wanita Warga Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat Dalam Pemilihan Kepala Daerah, Kota Bandar Lampung Tahun 2005). Penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang cukup erat antara jenjang pendidikan dengan partisipasi politik pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2005. Disebutkan dalam kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang positif antara jenjang pendidikan dengan partisipasi politik wanita warga Kelurahan Gedong Air, yang berarti semakin tinggi jenjang pendidikan maka akan semakin tinggi pula tingkat partisipasinya.

(Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung)

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah dimana penelitian sebelumnya hanya fokus pada apakah jenjang pendidikan memiliki hubungan dengan partisipasi politik artinya penelitian di atas hanya ingin membuktikan bahwa pendidikan memiliki hubungan dengan partisipasi politik. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui mengapa partisipasi perempuan di Kampung Bumi Dipasena Agung sangat rendah, apakah faktor-faktor yang disebutkan peneliti, menjadi penyebab rendahnya partisipasi politik perempuan di kampung ini, artinya pada penelitian ini tidak terfokus pada pendidikan saja tetapi juga pada sosial ekonomi, kinerja pemerintah, dan citra kandidat.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis merasa permasalahan yang diangkat menarik untuk diteliti, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap rendahnya partisipasi

politik perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 (Studi kasus Kampung Bumi Dipasena Agung Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang).”

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut “Apa Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap rendahnya partisipasi politik perempuan Kampung Bumi Dipasena Agung Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017 ?”

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap rendahnya partisipasi politik perempuan Kampung Bumi Dipasena Agung Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017.

D. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tambahan informasi dan referensi di bidang ilmu sosial dan ilmu politik khususnya pada bidang kajian partisipasi politik perempuan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembuatan kebijakan menyangkut partisipasi politik perempuan

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Partisipasi Politik

1. Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek demokrasi yang menentukan kualitas demokrasi suatu negara. Berikut ini definisi partisipasi politik menurut beberapa ahli:

Tabel 3. Definisi Partisipasi Politik Menurut Ahli

Nama Ahli	Definisi
Budiarjo (1982:1)	Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah.
Nie dan Verba (1982:1) dalam buku <i>Handbook of Political Science</i> yang dikutip oleh Budiardjo	Partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang bertujuan mempengaruhi seleksi pejabat ataupun kebijakan-kebijakan yang mereka buat.

Nama Ahli	Definisi
Nelson dalam buku yang ditulis Sastroadmodjo (1995:77)	Membedakan partisipasi politik menjadi dua sifat, yaitu <i>autonomous participation</i> atau partisipasi otonom dan <i>mobilized participation</i> atau partisipasi yang dimobilisasi atas desakan orang lain
McClosky dalam buku yang ditulis Budiardjo (1982:1)	Partisipasi politik ialah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan publik.
Weine dalam buku yang ditulis Sastroadmodjo (1995:71)	Partisipasi politik hanyalah kegiatan-kegiatan yang didasari oleh kesukarelaan saja atau sering disebut partisipasi otonom, yaitu kegiatan yang tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Sedangkan tindakan-tindakan yang tidak didasarkan pada kesukarelaan tidaklah masuk kedalam partisipasi politik
Kaid dan Halz-Bach dalam buku yang ditulis Subiakto (2012:64)	Partisipasi politik merupakan tindakan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah yang meliputi pemberian suara, menandatangani petisi, atau demonstrasi.
Huntington dan Nelson dalam buku <i>No Easy Choice : Political Participation in Developing Countries</i> dikutip oleh Budiardjo (1982:2)	Partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara yang dimaksud untuk mempengaruhi keputusan pemerintah, bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadic, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. Huntington dan Nelson beranggapan meski dengan melakukan tindakan kekerasan dan ilegal selama bertujuan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah tindakan tersebut merupakan partisipasi politik.

Memberikan suara dalam pemilihan dan berdemonstrasi nampak seperti bentuk nyata partisipasi politik, tetapi seringkali tindakan-tindakan tersebut tidak didasari oleh motivasi intern atau niat pribadi pelakunya untuk

mempengaruhi kebijakan pemerintah. Menurut Huntington dan Nelson dalam buku yang ditulis Sastroadmodjo (1995:71) diperlukan peninjauan yang luas mengenai pola-pola partisipasi politik antara partisipasi otonom dan partisipasi yang dimobilisasi sehingga keduanya tidak perlu dibedakan, seperti berikut ini:

- a. Perbedaan antara partisipasi yang otonom dan yang dimobilisasi lebih dalam hal prinsip, bukan pada aspek realitas. Secara realitas keduanya sulit untuk dikotomikan, satu dalam kutub A dan yang lain dalam kutub B. Dalam banyak kasus perbedaan yang terjadi justru terletak di batas keduanya yang relatif terbatas, selain itu batas dan perbedaan keduanya tidaklah jelas.
- b. Hampir semua sistem politik mengandung campuran antara partisipasi politik yang otonom dan yang dimobilisasi. Persoalannya adalah pada aspek kadar partisipasinya yang bukan saja pada aspek individu melainkan juga pada sistem politiknya. Jangan salah menilai bahwa partisipasi politik hanya ada pada sistem politik yang otoriter. Di dalam sistem otoriter pun terdapat partisipasi politik, hanya saja kadar dan cara aktualisasinya berbeda dengan sistem demokrasi.
- c. Dua kategori partisipasi tersebut memiliki hubungan yang dinamik, tingkah laku yang sebelumnya dikategorikan sebagai bentuk partisipasi yang dimobilisasi lambat laun dapat berubah menjadi otonom ataupun sebaliknya. Masyarakat semakin sadar akan hak serta kewajiban dalam bidang politik mengakibatkan partisipasi yang dimobilisasi berubah menjadi partisipasi otonom. Timbulnya

keinginan pemerintah atau pimpinan politik untuk mendukung kepentingan politiknya dengan melakukan proses manipulasi dan mobilisasi partisipasi politik dapat mengakibatkan berbaliknya partisipasi yang sebelumnya otonom menjadi partisipasi yang dimobilisasi.

- d. Dua kategori partisipasi tersebut memiliki konsekuensi yang sama pentingnya bagi sistem politik. Tegas dikatakan meskipun secara nyata memiliki motivasi yang berbeda keduanya memiliki konsekuensi yang saling sulit dipisahkan. Konsekuensi antara pemimpin yang didukung oleh otonom dan pemimpin yang didukung oleh pendukung yang dimobilisasi adalah sama. Dengan kata lain tidaklah tepat untuk menyatakan bahwa partisipasi antara yang otonom dan yang dimobilisasi berbeda.

Dari alasan-alasan di atas dapat dipahami mengapa Huntington tidak ingin adanya perbedaan antara partisipasi yang otonom dan partisipasi yang si mobilisasi, karena perbedaan-perbedaan yang ada tak semuanya dapat diketahui dari luar.

2. Bentuk-Bentuk Partisipasi

Kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai berbagai bentuk dan intensitas, sehingga perbedaan dilakukan menurut bentuk dan intensitas. Sastroadmodjo (1995:74) membedakan partisipasi politik sebagai suatu kegiatan menjadi dua yaitu, partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif mencakup kegiatan mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan yang

berbeda dengan kebijakan pemerintah, kritik, saran, dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak, dan ikut serta dalam pemilihan orientasinya adalah masukan dan keluaran politik. Partisipasi pasif mencakup kegiatan mentaati pemerintah, menerima dan melaksanakan kegiatan begitu saja setiap keputusan pemerintah, hanya berorientasi pada keluaran politiknya saja.

Almond dalam buku yang ditulis Cahyono (1991:181-182) mengungkapkan bahwa partisipasi politik yang dianggap sebagai bentuk normal atau sudah umum dalam demokrasi modern adalah berupa kegiatan pemberian suara, diskusi politik, kegiatan kampanye, bergabung dalam kelompok kepentingan, atau melaksanakan komunikasi individu dengan pejabat-pejabat politik. Di negara-negara Eropa kegiatan-kegiatan diskusi politik, bergabung dalam kelompok kepentingan, dan melakukan komunikasi dengan pejabat-pejabat politik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh elit masyarakat . sementara itu kelas menengah kebawah lebih aktif dalam kegiatan pemberian suara dan relawan kampanye.

Milbrath dan Goel dalam buku yang ditulis Sastroadmodjo (1995:74) membedakan partisipasi menjadi beberapa kategori, kategori apatis, spektator, gladiator, dan pengkritik. Kategori apatis merupakan orang yang menarik diri dari proses politik. Apatis (masa bodoh) dapat diartikan sebagai tidak punya minat atau tidak punya perhatian terhadap orang lain, situasi, atau gejala-gejala. Ciri-ciri apatis antara lain ketidak mampuan untuk mengakui tanggung jawab pribadi, untuk menyelidiki, atau menerima emosi

dan perasaan sendiri, yaitu perasaan samar-samar yang tidak dapat dipahami, menerima secara mutlak tanpa tantangan otoritas nilai-nilai konvensional.

Kategori spektator berupa orang-orang yang setidaknya-tidaknya pernah ikut dalam pemilihan umum. Kategori gladiator, yaitu orang-orang yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni sebagai komunikator dengan tugas khusus mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan relawan kampanye, serta aktivis masyarakat. Kategori pengkritik, yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk tidak konvensional.

Menurut Rosenberg dalam buku yang ditulis Hoogerwerf (1985:190) apatis politik timbul akibat dari kurangnya kepercayaan terhadap efektivitas partisipasi politik. Masyarakat yang sebelumnya tidak apatis menjadi apatis dikarenakan kenyataan bahwa partisipasi yang mereka lakukan tidak mempengaruhi apapun, sehingga timbul kekecewaan terhadap partisipasi. Jones dalam buku yang ditulis Hoogerwerf (1985:190) menganggap bahwa apatis politik sebagai tanda demokrasi yang sehat, hal ini mengindikasikan bahwa adanya toleransi yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat untuk tidak menggunakan haknya.

Rosenberg dalam buku yang ditulis Sastroadmodjo (1995:74) menyebutkan bahwa ada tiga alasan mengapa orang bersikap apatis, yaitu:

- a. Individu memandang bahwa aktivitas politik merupakan ancaman terhadap kehidupannya. Aktivitas politik dianggap dapat merusak hubungan sosial atau dapat merusak kehormatan dirinya dengan jalan

mengungkapkan kebodohan sendiri, ketidak seimbangan dan ketidak mampuan, sehingga ketidak aktifan dipandang lebih cocok dari pada keaktifan.

- b. Individu menganggap aktivitas politik merupakan kegiatan yang sia-sia belaka. Individu-individu beranggapan bahwa ia tidak mungkin dapat merubah keadaan dan melakukan kontrol politik, justru yang terjadi adalah *gap* antara cita-cita dan realitas yang tak ada satupun orang yang dapat menjembatannya.
- c. Individu menganggap bahwa ketidakadaan pesaing yang didasarkan pada pikiran bahwa politik tidak menarik baginya politik hanya memberikan kepuasan sedikit dan tak langsung. Dengan kata lain bahwa partisipasi bukanlah hal yang layak untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

Ada beberapa julukan lain selain apatis yang diberikan kepada orang-orang yang tidak ikut serta dalam politik, seperti *sisnis*, alienasi (*terasing*), dan anomie (terpisah). Agger dalam buku yang ditulis Sastroadmodjo (1995:76) mengartikan sinisme sebagai “kecurigaan yang busuk dari manusia”. Secara politis sinisme memiliki ciri-ciri seperti perasaan bahwa politik merupakan urusan yang kotor, politik tidak dapat dipercaya, individu dijadikan bulan-bulanan dari orang yang melakukan manipulasi.

Alienasi dinyatakan oleh Lane dalam buku yang ditulis Sastroadmodjo (1995:76) sebagai perasaan *terasing* seseorang dari politik dan pemerintahan masyarakat dan kecendrungan berpikir mengenai pemerintahan dan politik bangsa yang dilakukakan oleh orang lain mengikuti aturan yang tidak adil.

Kelompok orang-orang yang termasuk kedalam alienasi menganggap bahwa keberadaan pemerintah tidak ada artinya serta tidak memberikan konsekuensi bagi kehidupan mereka. Lane mengungkapkan bahwa sikap anomie sebagai kondisi dimana seorang individu mengalami perasaan ketidakefektifan dan bahwa para penguasa bersikap tidak peduli yang mengakibatkan devaluasi dari tujuan-tujuan dan hilangnya urgensi untuk bertindak.

Bentuk-bentuk partisipasi politik berdasarkan jumlah pelakunya dikategorikan menjadi dua, yaitu partisipasi politik individual dan partisipasi politik kolektif. Partisipasi politik individual dapat berwujud kegiatan menulis surat kepada pemerintah yang berisi tuntutan ataupun keluhan-keluhan, yang dimaksud dengan partisipasi politik kolektif adalah kegiatan-kegiatan warga negara secara serentak yang dimaksudkan untuk mempengaruhi penguasa.

Partisipasi kolektif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi politik konvensional dan non-konvensional. Dalam konteks perilaku politik jenis-jenis partisipasi politik konvensional dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pemberian suara dalam kegiatan pemilihan umum merupakan partisipasi politik yang biasa yang sering kali lebih luas bila dibandingkan partisipasi politik lain. Harus disadari bahwa kegiatan pemilihan umum merupakan bentuk partisipasi politik kolektif yang besar yang telah membedakannya dari partisipasi politik lainnya. Di negara demokratis pemilihan umum

merupakan alat untuk memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta mempengaruhi kebijakan pemerintah.

- b. *Lobbying* merupakan kegiatan yang dilakukan secara individual dan kolektif, pada dasarnya *lobbying* dilakukan untuk mengadakan pendekatan dengan pejabat-pejabat pemerintah atau pemimpin-pemimpin politik, dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan-keputusan.
- c. Salah satu bentuk partisipasi politik adalah mengikuti kegiatan organisasi politik, yang oleh Almond dikatakan sebagai kegiatan membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan.
- d. Bentuk lain partisipasi politik dalam konteks perilaku adalah mencari koneksi. Mencari koneksi merupakan suatu tindakan yang berusaha untuk melakukan pendekatan-pendekatan dengan pejabat-pejabat pemerintah, yang dimaksudkan untuk mencari keuntungan dan kemudahan dalam segala urusan sehingga kepentingan pribadi dapat diperoleh.

Roth dan Wilson dalam buku yang ditulis Budiardjo (1982:6) menggambarkan partisipasi politik ke dalam bentuk piramida yang basisnya lebar, tetapi menyempit ke atas sejalan dengan meningkatnya intensitas politik. Berbagai kegiatan yang berbeda-beda intensitasnya terdapat di antara puncak dan basis, berbeda menurut intensitas kegiatan maupun mengenai bobot komitmen dari orang yang bersangkutan. Termasuk di dalamnya memberi suara dalam pemilihan umum, mendiskusikan masalah politik, menghadiri rapat umum yang bersifat politik, dan menjadi anggota kelompok kepentingan. Basis yang lebih intensif lagi melibatkan diri dari

berbagai proyek pekerjaan sosial, *contacting* atau *lobbying* pejabat-pejabat, bekerja aktif sebagai anggota partai politik dan menjadi juru kampanye. Basis yang paling intensif, sebagai pimpinan partai atau kelompok kepentingan dan pekerja sepenuh waktu.

Gambar 1. Piramida Partisipasi Politik.



Sumber: Miriam Budiarmo. 1982. Partisipasi dan Partai Politik Sebuah Mata Rantai.

Bentuk bentuk partisipasi politik non-konvensional sedikit berlawanan dengan partisipasi politik konvensional. Partisipasi politik non-konvensional meliputi pengajuan petisi, demonstrasi, konfrontasi, pemogokan, dan serangkaian tindakan kekerasan politik, selain itu kudeta dan gerilya revolusi juga termasuk kedalamnya.

Kebutuhan pemerintah sebagai lembaga atas partisipasi politik warga negaranya dapat dikemukakan dalam bentuk berbagai fungsi. Sastrodmodjo (1995:86) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat berfungsi untuk mendukung program-program pemerintah, partisipasi

berfungsi sebagai organisasi yang menyuarakan kepentingan masyarakat, dan sebagai fungsi kontrol.

3. Motif-Motif Partisipasi

Partisipasi politik merupakan bentuk tingkah laku baik menyangkut aspek sosial maupun politik. Tindakan dan aktivitas politik tidak hanya menyangkut apa yang telah dilakukan saja, tetapi juga menyangkut motif-motif yang dapat mendorong individu untuk berpartisipasi. Weber dalam buku yang ditulis Sastroadmodjo (1995:82) mengemukakan ada empat motif yaitu:

- a. Motif rasional-bernilai, yaitu motif yang didasarkan atas penerimaan secara rasional atas nilai-nilai suatu kelompok. Motif ini merupakan motif yang mendorong tingkah laku untuk beraktifitas atas dasar pertimbangan-pertimbangan logis dan rasional terhadap suatu kelompok
- b. Motif efektifual-emosional, yaitu motif yang didasarkan atas kebenaran (*enthusianisme*) terhadap suatu ide, organisasi, atau individu. Motif ini didasarkan pada kebencian tertentu yang melekat pada individu dalam menilai gagasan, orrganisasi, atau individu lain. Dorongan ini juga membentuk sikap apriori, ketidaksenangan terhadap suatu kelompok yang kemudian dalam bentuknya yang konkrit menjadi bentuk apatisisme, sinisme, dan alienasi.
- c. Motif tradisional, yaitu motif yang didasarkan atas penerimaan norma, tingkah laku individu dari suatu kelompok sosial. Motif ini menurut Weber didasarkan atas penerimaan norma tingkah laku individu dalam suatu kelompok sosial.

- d. Motif rasional-bertujuan, yaitu motif yang didasarkan atas kepentingan pribadi, aktivitas selain didasarkan atas keuntungan-keuntungan apa yang dapat diperoleh dari kegiatan politik tersebut.

Terdapat hambatan dalam mengkaji motif-motif yang mendorong tingkah laku sosial dan politik individu. Hambatan tersebut antara lain disebabkan oleh beberapa hal yaitu, motif yang sebenarnya yang dimiliki individu telah disembunyikan, motif yang sesungguhnya mungkin tidak jelas bagi individu dan mungkin ia merasionalkan tindakannya sendiri sebelum, sesudah, atau selama belangsungnya peristiwa tersebut, dan terakhir mungkin motif yang sebenarnya tidak jelas.

Lane dalam buku yang ditulis Sastroadmodjo (1995:84-85) dalam studinya mengenai keterlibatan politik juga menyebutkan bahwa partisipasi politik setidaknya memiliki empat motif. Motif pertama sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi. Dalam fungsinya sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi, partisipasi politik seringkali muncul dalam bentuk upaya-upaya menjadikan arena politik untuk memperlancar ekonominya. Motif kedua sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial yakni memenuhi kebutuhan akan harga diri, meningkatnya status sosial, dan merasa terhormat karena dapat bergaul dengan pejabat-pejabat terkemuka dan penting. Motif ketiga sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus seperti mendapatkan pekerjaan, proyek, tender, dan melancarkan karier pekerjaannya. Motif yang keempat sebagai

sarana untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologi tertentu seperti kepuasan batin dan perasaan terhormat.

Sanit dalam buku yang ditulis Sastroadmodjo (1995:85) mengemukakan bahwa tujuan partisipasi politik di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga. Pertama memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintah yang dibentuknya beserta sistem politik. Partisipasi ini terwujud dalam bentuk pengiriman wakil ke pemerintah, pembuatan pernyataan dukungan terhadap pemerintah, dan pemilihan kandidat oleh organisasi politik. Kedua partisipasi yang dimaksudkan sebagai usaha untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintah dengan harapan agar pemerintah meninjau kembali, memperbaiki atau mengubah kelemahan tersebut.

Partisipasi ini terujud dalam bentuk pengajuan petisi, demonstrasi, resolusi, aksi mogok, dan aksi protes. Ketiga partisipasi sebagai tantangan terhadap penguasa dengan maksud menjatuhkannya sehingga diharapkan terjadi perubahan struktur dalam pemerintahan dan dalam sistem politik. Partisipasi ini terujud dalam bentuk pemogokan, pembangkangan politik, huru-hara, dan bahkan kudeta bersenjata.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Partisipasi politik sebagai suatu aktivitas dipengaruhi berbagai faktor, ahli politik menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik melalui berbagai pendekatan, dua pendekatan yang sering digunakan adalah pendekatan sosial dan psikologi pemilih, pendekatan yang pertama

menekankan pada kondisi sosial sedangkan yang kedua menekankan pada harapan pemilih tentang keuntungan dan kerugian atas keputusan pemilih. Dua teori yang akan menjadi dasar dalam penelitian ini adalah teori Ramlan Surbakti dan Khoirudin. Berikut ini penjelasan tentang dua teori dasar yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Faktor Latar Belakang Sosial-ekonomi

Ramlan Surbakti dalam buku yang ditulis Efriza (2012:195) menyatakan bahwa tinggi rendahnya partisipasi politik dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi pemilih seperti pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Ketiga aspek di atas didukung oleh Damsar dalam buku yang ditulis Efriza (2012:195-197) yang melihat faktor sosial-ekonomi dapat diukur dari beberapa indikator seperti status sosial, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, atau kekayaan.

Faktor latar belakang sosial-ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini menekankan pada dua aspek, yaitu faktor status sosial dan faktor pendidikan formal pemilih. Alasan penggunaan faktor yang pertama berdasar pada pendapat Frank Lindefold dalam buku yang ditulis Efriza (2012:197) yang menyatakan bahwa seseorang yang mempunyai kepuasan finansial, ternyata terlibat dalam kehidupan politik. Alasan penggunaan faktor yang kedua didasarkan atas pemahaman bahwa fungsi pendidikan sebagai sarana memberikan dan membentuk tahapan-tahapan kecerdasan politik, sehingga semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi kesadaran akan hak dan kewajiban dirinya sebagai warga negara.

Indikator yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh faktor sosial-ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Status sosial, diukur melalui status sosial pemilih yang mengacu pada pendapatan, pekerjaan, dan jabatan.
2. Pendidikan, diukur melalui tingkat pendidikan formal yang dimiliki pemilih.

b. Faktor Kekecewaan Pada Realitas Pemerintah dan Politik

Khoirudin dalam buku yang ditulis Efriza (2012:540) mengungkapkan bahwa fenomena semakin meningkatnya angka pemilih yang memilih untuk tidak memilih atau golput dapat dipandang dari dua perspektif, yaitu:

“pertama, munculnya ketidakpercayaan terhadap saluran politik dalam bentuk partai, yang kemudian berakibat terhadap perspektif kedua, keinginan waga negara untuk melakukan delegitimasi terhadap kekuasaan. padahal tanpa adanya legitimasi dari warga negara, sebuah kekuasaan dapat dianggap tidak ada.”

Kondisi yang menyebabkan tinggi rendahnya partisipasi politik sangat erat kaitannya dengan kekecewaan pada realitas pemerintah dan politik. Penilaian, dan apresiasi terhadap pemerintah baik terhadap kebijakan-kebijakan maupun terhadap pelaksanaan pemerintahannya dapat mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik. Kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah dan politik diakibatkan kenyataan bahwa kinerja pemerintah buruk dan citra anggota parpol yang kerap melakukan korupsi.

Citra kandidat merupakan salah satu bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam pemilihan. Citra merupakan nilai jual utama para kandidat, kualitas pribadi akan menjadi tolak ukur ketertarikan pemilih terhadap kandidat yang nantinya akan berimplikasi terhadap sikap pemilih untuk memutuskan menggunakan hak pilihnya atau tidak. Faktor kekecewaan pada realitas pemerintah dan politik merupakan faktor yang menilai bahwa keputusan politik pemilih adalah keputusan yang rasional yang dipengaruhi oleh realitas di lapangan, indikator yang dapat menjelaskan faktor kekecewaan pada realitas pemerintah dan politik adalah sebagai berikut:

1. Kinerja Pemerintah dapat diukur dari bagaimana kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat terpenuhi dalam rangka pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah sebagai administrasi keadilan sosial.
2. Citra kandidat yang diukur dari kualitas pribadi kandidat terkait integritas, gaya berpolitik, rekam jejak, latar belakang, serta prestasi atau penghargaan yang dimiliki oleh kandidat.

Beberapa faktor inilah yang kemudian digunakan untuk menjelaskan tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik perempuan di Kelurahan Bumi Dipasena Agung dalam pilkada Tulang Bawang Tahun 2017. Penulis menggunakan dua faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi yaitu faktor status sosial-ekonomi dan kekecewaan pada realitas pemerintah dan politik, kemudian diukur pengaruh masing-masing faktor terhadap

rendahnya partisipasi politik perempuan di Kelurahan Bumi Dipasena Agung.

B. Partisipasi Politik Perempuan

Teori *narture* dan *nurture* dalam kaitannya tentang psikologi laki laki dan perempuan masih menjadi perdebatan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Pengikut teori *nature* yang ekstrem beranggapan bahwa perbedaan psikologis antara perempuan dan laki laki hanya disebabkan oleh perbedaan biologis saja, sedangkan pengikut teori *nurture* beranggapan bahwa perbedaan psikologis ini disebabkan oleh proses belajar dari lingkungan.

Muniarti dalam buku yang ditulis Ridjal dkk. (1993:3) menyatakan bahwa pada awalnya perbedaan memang alamiah, *nature*, fitrah, kemudian melalui kebudayaan (*nurture*), kehidupan manusia dikembangkan, direkayasa, dipaksa, dicegah, atau bahkan diperlakukan berlawanan (kontradiksi) dengan dasar alamiah. Sejarah manusia terbentuk melalui proses proses tersebut, yang kemudian disebut sebagai kebudayaan. Manusia sejak lahir telah menerima identitas dari orang tuanya, melalui proses belajar manusia membedakan jenis laki-laki dan perempuan tidak hanya memandang aspek biologis tetapi juga dikaitkan dengan fungsi dasar dan kesesuaian pekerjaan. Proses ini memunculkan teori gender, yang merupakan dasar berfikir pembedaan dua jenis kelamin berdasarkan kepantasannya.

Rodgers dalam buku yang ditulis Ridjal dkk (1993:30) menyatakan pada umumnya jenis kelamin laki-laki berhubungan dengan gender maskulin,

sementara jenis kelamin perempuan berkaitan dengan gender feminin, akan tetapi hubungan ini tidak merupakan korelasi absolut. Istilah gender sering diartikan sebagai jenis kelamin (*seks*), Keduanya memang mengacu pada perbedaan jenis kelamin tetapi gender adalah hasil konstruksi sosial yang terdiri dari sifat, sikap dan perilaku seseorang. Gender tidak bersifat universal, sifatnya bervariasi dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain. Menurut Gallery dalam buku yang ditulis Ridjal dkk. (1993:30) ada dua elemen gender yang bersifat universal yaitu gender tidak identik dengan jenis kelamin dan gender merupakan dasar dari pembagian kerja di semua masyarakat.

Penelitian tentang laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh Wiliam dan Best dalam buku yang ditulis Ridjal dkk. (1993:31) mencakup 30 negara menampilkan semacam konsensus tentang atribut laki-laki dan perempuan. Penelitian ini membuktikan bahwa meski gender tidak bersifat universal tetapi terjadi generalisasi kultural. Pada umumnya laki-laki dipandang sebagai individu yang lebih kuat dan aktif serta ditandai oleh kebutuhan besar akan pencapaian, dominasi serta agresi. Sebaliknya perempuan dipandang sebagai individu yang lemah, dan kurang aktif, lebih menaruh perhatian pada afiliasi, keinginan untuk mengasuh dan mengalah.

Pandangan mengenai perbedaan laki-laki dan perempuan secara psikologi ini dibentuk oleh budaya masyarakat itu sendiri. Cantor dkk (1998:94) dalam buku yang berjudul *Women in Power* menyatakan bahwa di Amerika sejak masa kanak-kanak individu telah diajarkan tiga aspek politik, pertama peran sebagai warga negara : memilih dan lain-lain, kedua hubungan warga negara dengan negara :

loyalitas, patriotisme, dan lain-lain, ketiga penampilan peran politik tertentu. Anak laki-laki mempelajari tiga aspek tersebut, namun anak perempuan hanya mempelajari aspek pertama dan kedua, mereka tidak dipersiapkan untuk peran politik sehingga sebagian besar dari mereka tidak pernah bermimpi untuk menduduki peran politik.

Dahl (1994:144) mengemukakan bahwa John Locke seorang filsuf Inggris sekalipun berpendapat seluruh manusia secara alamiah setara namun ia tidak pernah menganjurkan agar kaum perempuan diizinkan untuk ikut memberikan suara. Perempuan dalam aspek peran sebagai warga negara yang memiliki hak untuk memilih didapatkan dari perjuangan yang panjang. Hak pilih perempuan tidak sertamerta didapatkan oleh kaum perempuan, berikut ini daftar serentetan negara-negara yang telah memberikan hak pilih pada perempuan :

Tabel 4. Negara-Negara Yang Telah Memberikan Hak Pilih Kepada Perempuan

Tahun	Negara	Tahun	Negara
1893	New Zealand	1920	Amerika Serikat
1902	Austria	1922	Irlandia
1906	Finlandia	1928	Inggris
1913	Norwegia	1931	Spanyol
1915	Denmark, Iceland	1932	Muang Thai, Brazilia, Uruguay
1917	Holland, USSR	1934	Srilanka, Cuba, Turki,
1918	Canada, Luxemburg	1935	Burma
1919	Austria, Czecholokia, Jerman, Polandia, Swedia	1937	Philipina
1944	Prancis	1942	Rep. Dominika

Sumber : *Encyclopedia Americana* dalam *Dinamika Pergerakan Perempuan Di Indonesia 1993*

Perempuan Indonesia mendapatkan hak pilihnya pada tahun 1949 bersamaan dengan perempuan India disusul oleh Malaysia pada tahun 1957. Perempuan di negara-negara Islam Timur Tengah mendapatkan hak pilihnya agak terlambat dimulai pada tahun 1949 sampai 1962. Mendapatkan hak pilih belum sepenuhnya menjamin persamaan hak perempuan dengan hak laki-laki yang pada umumnya bersumber pada faktor sosial budaya yang menempatkan pria pada tempat yang lebih tinggi dari pada perempuan, hal ini umumnya terjadi di negara-negara Asia dan Afrika.

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menjamin untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental seluruh umat manusia, laki-laki dan perempuan, dengan *Universal Declaration of Human Rights* di tahun 1949. Pengakuan hak-hak perempuan secara komprehensif juga telah dicapai, ketika PBB mengadopsi *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Konvensi Wanita) di tahun 1979 yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 24 Juli 1984 dalam UU No.7 tahun 1984.

Ihromi dkk (2000:36) *Convention on the Political Elimination of All of Discrimination Against Women* (CEDAW) memiliki prinsip dasar kewajiban negara pesertanya yang telah diatur, meliputi hal-hal berikut ini:

1. Menjamin hak-hak wanita melalui hukum dan kebijakan serta menjamin hasilnya (obligation of results);
2. Menjamin pelaksanaan praktis dari hak-hak itu melalui langkah-langkah atau aturan khusus menciptakan kondisi yang kondusif untuk

meningkatkan kemampuan akses anita pada peluang dan kesempatan yang ada;

3. Negara tidak saja menjamin tetapi juga merealisasikan hak-hak wanita;
4. Tidak saja menjamin *de-jure* tetapi juga secara *de-facto*;
5. Negara tidak saja harus mengaturnya di sektor publik tetapi juga terhadap tindakan dari orang-orang dan lembaga di sektor privat dan swasta.

Ihromi dkk (2000:36-37) Langkah-langkah khusus yang harus dilakukan negara meliputi:

1. Menurut Pasal 2 Konvensi Wanita, negara wajib:
 - a. Mengutuk diskriminasi, melarang segala bentuk diskriminasi terhadap wanita melalui peraturan perundang-undangan dan kebijakan, serta realisasinya.
 - b. Menegakkan perlindungan hukum terhadap wanita melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, serta perlindungan wanita yang efektif terhadap setiap tindakan diskriminasi.
 - c. Mencaabut semua aturan dan kebijakan, kebiasaan dan praktek yang diskriminatif terhadap wanita.
 - d. Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap wanita.
2. Pasal 3 Konvensi Wanita menetapkan kewajiban negara untuk langkah-langkah proaktif di semua bidang, khususnya bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya serta menciptakan lingkungan dan kondisi yang menjamin pengembangan kemajuan wanita.

3. Pasal 4 Konvensi Wanita mewajibkan negara untuk melakukan langkah *affirmative actions* untuk mempercepat persamaan *de-facto*, serta mencapai persamaanperlakuan dan kesempatan bagi pria dan wanita.

Ihromi dkk (2000:37) Kewajiban lain yang harus dilaksanakan oleh negara peserta Konvensi Wanita CEDAW adalah berikut ini:

1. Meratifikasi CEDAW berarti bahwa negaraa peserta mengikat dirinya untuk melaksanakan ketentuan-keteentuan dalam konvensi.
2. Negara peserta berkewajiban memberikan laporan mengenai pelaksanaan Konvensi Wanita kepada UN CEDAW setiap empat tahun sekali. laporan meliputi peraturan legis latif, yudikatif, administratif dan langkah-langkah yang telah diambil untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan konvensi dan kemajuan yang dicapai (Pasal 18 Konvensi Wanita).
3. Dalam menyusun laporan kepada CEDAW harus diperhatikan pula:
 - a. Rekomendasi umum CEDAW.
 - b. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan Konvensi Wanita di sektor publik, swasta, LSM, organisasi wanita, orsospol, dan sebagainya.

Ihromi dkk (2000:43) Konvensi Wanita memuat ketentuan tentang hak-hak wanita dalam bidang politik sebagai berikut:

1. Menjamin persamaan hak untuk memilih dan dipilih;
2. Jaminan untuk partisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya;
3. Memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat;
4. Berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan;

5. Berpartisipasi dalam perkumpulan non pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.

Kaum perempuan telah melalui perjuangan yang panjang, namun menggunakan hak pilih dalam pemilu untuk kebanyakan wanita dilihat sebagai kewajiban dibandingkan hak sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Ihromi dkk (2000:292) Di Indonesia adanya jaminan persamaan hak antara laki laki dan perempuan tertuang dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 Tentang Hak Asasi Manusia “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Indonesia saat ini telah banyak mengalami kemajuan, semua peraturan dan undang-undang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam meraih kesempatan pendidikan, kerja, dan di bidang politik.

Amir Efendi Siregar, dkk . 2009. Jurnal SOSDEM Representasi Politik Perempuan : Sekedar Ada atau Pemberi Warna.

Hal. 8

Berbagai regulasi negara menyangkut isu perempuan membuktikan bahwa konstruksi budaya politik patriarki sepanjang sejarah amat menentukan kehidupan perempuan. Sejak dekade 1960-an, gerakan feminisme yang menggeliat di berbagai belahan dunia (termasuk di Indonesia pada dekade 1990-an), terus menggugat dasar kebijakan negara yang bias jender, mendorong peran, fungsi, dan posisi perempuan secara lebih progresif, serta memprotes berbagai kebijakan konservatif negara dan stigma masyarakat yang memarjinalisasi aspirasi, hak, dan kepentingan perempuan. Kaum feminis yang peduli pada pentingnya kesetaraan jender dalam membangun watak bangsa, menuntut perubahan yang progresif atas posisi perempuan, seperti tercermin dalam polemik isu poligami, isu kekerasan dalam rumah tangga, isu hak-hak reproduksi perempuan, atau isu peraturan daerah tentang pelacuran. Menurut Gadis Arivia (2005), hampir seluruh regulasi negara yang terkait dengan soal perempuan mengandung materi bias jender. Sebab, dalam struktur masyarakat patriarkis, konstruksi sosial-budaya perempuan kerap digunakan sebagai alat legitimasi politik.

Subiantoro. 2014. *Jurnal Translitera: Dinamika Kesetaraan Gender Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia*

Hal. 9

Di Indonesia, isu kesetaraan gender akhir-akhir ini menjadi isu yang tidak ada habisnya dan masih berusaha terus diperjuangkan baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. Permasalahan tentang kesetaraan gender ini mencakup substantif pemahaman tentang kebijakan perspektif gender itu sendiri. Oleh karenanya, gerakan gender kemudian menjadi arus utama di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia. Dalam proses demokratisasi, persoalan partisipasi politik perempuan yang lebih besar, representasi dan persoalan akuntabilitas menjadi persyaratan mutlak bagi terwujudnya demokrasi yang lebih bermakna di Indonesia. Demokrasi yang bermakna adalah demokrasi yang memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan mayoritas penduduk Indonesia yang terdiri dari perempuan. Ide bahwa politik bukan wilayah bagi perempuan adalah ide yang selalu didengungkan selama berabad-abad, dan ternyata memang sangat efektif untuk membatasi perempuan untuk tidak memasuki wilayah ini. Terminologi publik dan privat yang erat kaitannya dengan konsep gender, peran gender, dan stereotype, telah menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan di antara perempuan dan laki-laki. Akibat yang paling jelas dari situasi politik seperti itu adalah marginalisasi dan pengucilan perempuan dari kehidupan politik formal. Untuk itu, diperlukan berbagai upaya untuk memperjuangkan kesetaraan gender dalam kehidupan politik, yang nantinya diharapkan akan memberikan perubahan pandangan tentang budaya patriarki bagi masyarakat, sehingga kemungkinan terpilihnya pemimpin politik perempuan akan sama dengan kemungkinan terpilihnya pemimpin politik laki-laki. Sehingga kesetaraan gender dalam dunia perpolitikan akan semakin maju dan efek sampingnya untuk kemajuan usaha pemberantasan korupsi bisa segera dirasakan.

C. Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Tjahjo Kumolo dalam pengantar buku yang ditulis Zaman (2016: IX) Penyelenggaraan pemerintahan telah diarahkan untuk mewujudkan profil pemerintahan yang demokratis dan desentralistik sejak awal era reformasi, sehingga telah dilakukan perubahan-perubahan atas undang-undang bidang politik dan undang-undang bidang pemerintahan. Dalam undang-undang bidang pemerintahan telah dilakukan perubahan undang-undang mengenai pemerintahan daerah agar proses penyelenggaraan pemerintah berubah dari sentralistik menjadi

desentralistik, serta perubahan atas undang-undang mengenai pemilihan kepala daerah, agar mekanisme pemilihan kepala daerah dapat berjalan sesuai kehendak rakyat.

Sesuai kehendak rakyat yang dimaksud adalah proses pemilihan kepala daerah dapat dilakukan secara terbuka dan langsung oleh rakyat. Indonesia sempat memiliki UU No.22 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang, ditetapkan oleh DPR RI, dalam undang-undang ini diatur tentang mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Presiden RI kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang mengatur mekanisme pilkada secara langsung oleh rakyat dan mencabut UU No.22 Tahun 2014. Ditetapkannya Perppu ini disebabkan oleh penolakan luas oleh rakyat mengenai UU No.22 tahun 2014 yang mengatur pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

Zaman (2016:4) Banyak pihak yang kontra dengan UU No.22 tahun 2014 menyampaikan penolakan dan kritik bukan hanya kepada DPR RI melainkan juga kepada Susilo Bambang Yudhoyono yang pada saat itu menjabat sebagai Presiden RI. Mereka berpendapat bahwa pilkada langsung merupakan sistem yang dianggap paling demokratis karena rakyat mengenal dan memilih secara langsung kepala daerahnya, sehingga legitimasi terhadap proses dan hasil pemilihan sangat besar. Menurut Joseph Schumpeter dikutip dari Zaman (2016:5) demokrasi adalah sebuah mekanisme memilih pemimpin politik di mana warga negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu di antara pemimin-pemimpin

politik yang bersaing meraih suara. Benar saja banyak penolakan yang terjadi karena UU tersebut dianggap mencederai kedaulatan rakyat.

Setelah pergantian presiden dan DPR RI perionde 2009-2014 ke periode 2014-2019, Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah, serta Perpu No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disahkan dalam Rapat Paripurna. Disahkannya Perppu No. 1 Tahun 2014 mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat, kemudian dikeluarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang isinya menghapus kewenangan DPRD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Daerah. 2 Februari 2015 Presiden Jokowi Menandatangani UU No.1 Tahun 2015 yang memberikan jaminan hukum dan politik bagi pelaksanaan pilkada langsung oleh rakyat.

Sebagaimana yang kita ketahui UU No.1 Tahun 2015 dibuat dalam waktu singkat sehingga diperlukan sejumlah revisi dan penyempurnaan. Melalui Rapat Paripurna pada 17 Februari 2015, DPR menegesahkan Perubahan UU No.1 Tahun 2015 tentang Pilkada menjadi UU No.8 Tahun 2015 . Undang-Undang No.8 Tahun 2015 tersebut disahkan dan diundangkan pada 8 Maret 2015 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57. Zaman (2016:63-64) Salah satu hasil penyempurnaan yang dilakukan adalah mengenai pemungutan suara secara serentak, konsep pilkada yang dilaksanakan serentak dalam rumusan UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana hasil dari Perpu No.1 Tahun 2015 perlu disempurnakan, mengingat rumusan tersebut mengakibatkan terjadinya pemotongan masa jabatan pejabat kepala daerah yang terlalu lama.

Zaman (2016: 64) Solusi yang ditawarkan dalam UU No.8 Tahun 2015 adalah dengan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak dengan mekanisme bergelombang. Serentak memiliki dua pengertian sebagaimana dikemukakan dalam UU No.8 Tahun 2015 dan pemilu nasional. Penegertian yang pertama bertujuan efisiensi dan pengertian yang kedua bertujuan lebih luas, yaitu efektifitas pemerintah daerah, konsolidasi demokrasi dan efisiensi. Pemilihan kepala daerah serentak dengan mekanisme bergelombang memiliki pengertian, serentak di beberapa daerah yang masa jabatan pejabat kepala daerahnya bersamaan atau berdekatan, karena sangat bervariasinya masa jabatan pejabat kepala daerah maka pilkada serentak dilaksanakan bergelombang.

Untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia pada 2027 diperlukan tujuh gelombang pilkada serentak. Ramlan Surbakti dalam pengantar buku yang ditulis Zaman (2016:LIV) Gelombang pertama diselenggarakan pada Desember 2015 untuk memilih kepala dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2015 dan semester pertama 2016, diikuti oleh 9 provinsi, dan 260 kabupaten/kota. Gelombang kedua baru saja dilaksanakan pada 15 Februari 2017 untuk kepala dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada semester kedua 2016 dan sepanjang 2017, diikuti oleh 7 provinsi dan 94 kabupaten/kota. Gelombang ketiga dilaksanakan pada Februari 2018 untuk kepala dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada semester kedua 2018 dan 2019, diikuti oleh 17 provinsi dan 154 kabupaten/kota.

Gelombang keempat dilaksanakan pada 2020 untuk kepala dan wakil kepala daerah yang dipilih pada pilkada serentak tahun 2015. Gelombang kelima dilaksanakan pada 2022 untuk kepala dan wakil kepala daerah yang dipilih pada pilkada serentak tahun 2017. Gelombang keenam dilaksanakan pada 2023 untuk kepala dan wakil kepala daerah yang dipilih pada pilkada serentak 2018. Gelombang ketujuh dilaksanakan pada 2027 untuk kepala dan wakil kepala daerah seluruh Indonesia.

Gagasan pilkada serentak lahir dari keresahan rakyat atas kesemrawutan pilkada selama ini, setidaknya dua atau tiga hari sekali Indonesia melaksanakan pilkada sebelum era pilkada serentak. Rutinitas seremonial ini melelahkan dan menguras banyak dana dan tenaga dalam proses pelaksanaannya tapi tak juga kunjung membawa perubahan. Melalui pilkada langsung dan serentak kita dapat mengurangi kepadatan aktivitas politik, sehingga masyarakat dapat bekerja dengan tenang dan pemerintah fokus dalam melaksanakan perogram kerjanya. Pilkada serentak menjadi harapan untuk memperbaiki perjalanan demokrasi indonesia selama ini dan membangun budaya politik baru yang lebih efektif dan efisien untuk mensejahterakan rakyat.

D. Kerangka Pikir

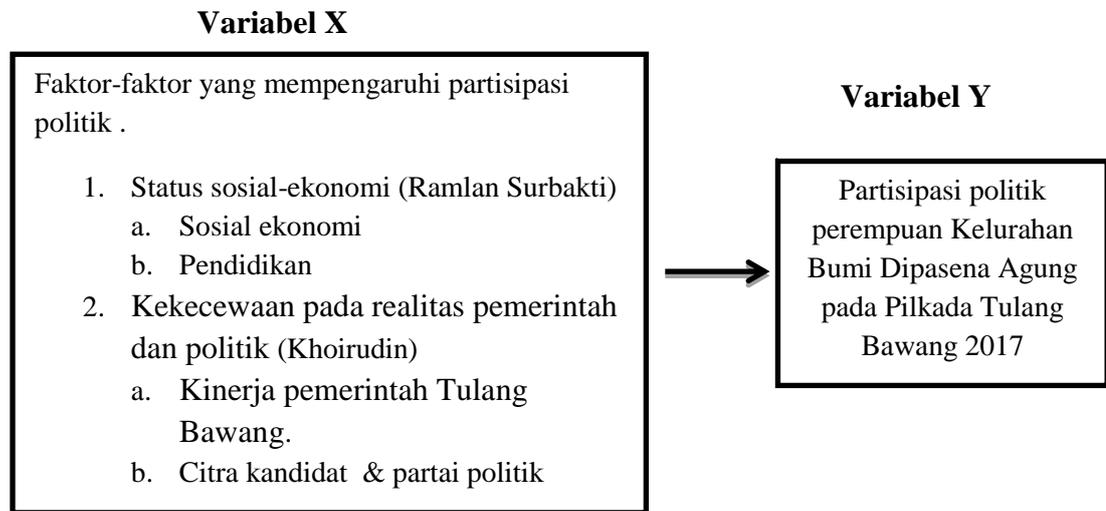
Partisipasi politik menjadi salah satu aspek demokrasi yang menentukan kualitas demokrasi suatu negara. Tinggi rendahnya partisipasi menunjukan apakah warga masyarakat memahami dan antusias dalam kegiatan kegiatan politik atau tidak sama sekali. Tingkat partisipasi yang berbeda-beda dipengaruhi oleh berbagai

faktor menurut Ramlan Surbakti dikutip dari Efriza (2012:195) diantaranya adalah umur, jenis kelamin, status ekonomi dan sosial, pendidikan, serta pekerjaan. Menurut Khoirudin dalam buku yang ditulis Efriza (2012:540) kekecewaan masyarakat pada realitas pemerintah dan politik dapat juga mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik di suatu negara. Kinerja pemerintah serta citra partai politik dan kadernya yang baik membawa dampak yang baik dalam partisipasi masyarakat.

Masyarakat yang percaya pada pemerintah dan partai politik akan cenderung lebih aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan pemerintah, masyarakat juga akan membantu dan memberikan sumbangan baik berupa materi maupun ide untuk membangun daerahnya. Sebaliknya bila kinerja pemerintah serta citra partai politik dan kadernya buruk, masyarakat akan cenderung bersifat apatis dan enggan berpartisipasi. Ketidakpercayaan masyarakat ini pada akhirnya akan menyebabkan deligitimasi kekuasaan pemerintah dengan cara tidak memberikan suara pada pemilu, demo, aksi anarki, dan bahkan yang terburuk ialah kudeta.

Kerangka pikir dalam penelitian ini disusun sebagai landasan penelitian yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap rendahnya partisipasi politik perempuan Kelurahan Bumi Dipasena Agung Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang dalam Pemilu 2017. Untuk lebih jelasnya kerangka pikir penelitian ini disajikan dalam bentuk bagan sebagai berikut:

Gambar 2. Bagan Kerangka Pikir



E. Hipotesis

Berdasarkan uraian kerangka pikir yang telah peneliti jelaskan di atas, peneliti mencoba merumuskan hipotesis bahwa faktor status sosial, pendidikan, ketidakpercayaan terhadap sistem politik, dan citra kandidat diduga berpengaruh dalam menyebabkan rendahnya partisipasi politik perempuan di Kelurahan Bumi Dipasena Agung, Dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. H_0 : Faktor status sosial tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap partisipasi politik perempuan Kelurahan Bumi Dipasena Agung dalam pilkada Tulang Bawang tahun 2017.

H_a : Faktor status sosial mempunyai pengaruh signifikan terhadap partisipasi politik perempuan Kelurahan Bumi Dipasena Agung dalam pilkada Tulang Bawang tahun 2017.

2. H_0 : Faktor pendidikan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap partisipasi politik perempuan Kelurahan Bumi Dipasena Agung dalam pilkada Tulang Bawang tahun 2017.

H_a : Faktor pendidikan mempunyai pengaruh signifikan terhadap partisipasi politik perempuan Kelurahan Bumi Dipasena Agung dalam pilkada Tulang Bawang tahun 2017.

3. H_0 : Faktor kinerja pemerintah tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap partisipasi politik perempuan Kelurahan Bumi Dipasena Agung dalam pilkada Tulang Bawang tahun 2017.

H_a : Faktor kinerja pemerintah mempunyai pengaruh signifikan terhadap partisipasi politik perempuan Kelurahan Bumi Dipasena Agung dalam pilkada Tulang Bawang tahun 2017.

4. H_0 : Faktor citra kandidat dan partai politik tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap partisipasi politik perempuan Kelurahan Bumi Dipasena Agung dalam pilkada Tulang Bawang tahun 2017.

H_a : Faktor citra kandidat dan partai politik mempunyai pengaruh signifikan terhadap partisipasi politik perempuan Kelurahan Bumi Dipasena Agung dalam pilkada Tulang Bawang tahun 2017.

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan tujuan eksplanatori karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sebab akibat antara faktor sosial ekonomi, pendidikan, kinerja pemerintah, citra kandidat dan partai politik dengan partisipasi politik perempuan. Firdaus (2012:43) penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menggunakan angka (*numerical*) dari hasil observasi dengan maksud untuk menjelaskan fenomena dari observasi. Bungin (2013:51) penelitian sosial menggunakan format ekplanasi dimaksud untuk menggambarkan suatu generalisasi atau hubungan satu variabel dengan variabel yang lain, karena itu *penelitian* ekplanasi menggunakan hipotesis.

B. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Variabel Independen (X)

Variabel independen merupakan variabel yang menjadi sebab terjadinya atau terpengaruhinya variabel dependen. Variabel independen dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Variabel X_1 : Faktor Sosial Ekonomi

Variabel X_2 : Faktor Pendidikan

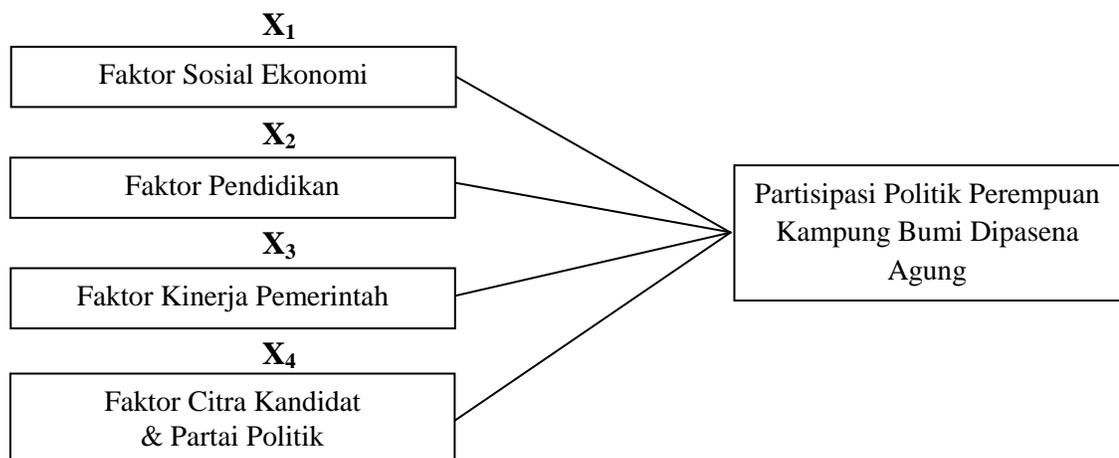
Variabel X_3 : Faktor Kinerja Pemerintah

Variabel X_4 : Faktor Citra Kandidat dan Partai Politik

2. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah partisipasi politik perempuan Kelurahan Bumi Dipasena Agung dalam Pemilu Pilkada Tulang Bawang 2017.

Gambar 3. Bagan Hubungan Antar Variabel



C. Definisi Konseptual

Bungin (2013: 73) konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu yang dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Berikut definisi konseptual variabel dalam penelitian ini:

1. Faktor latar belakang status sosial-ekonomi

a. Sosial Ekoomi

Sosial ekonomi adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang-orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya, yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi.

b. Pendidikan

Pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan.

2. Faktor Kekecewaan pada realitas pemerintah dan politik

a. Kinerja Pemerintah

Kinerja Pemerintah merupakan hasil kerja dari pelaksanaan fungsi-fungsi dan program kerja yang telah disusun

b. Citra Kandidat dan Partai Politik

- Arifin (2014:88) Citra kandidat yaitu atribut dan gaya personal kandidat politik seperti yang dipersepsikan oleh pemberi suara.

- Cita Partai atribut dan gaya partai politik seperti yang dipersepsikan oleh pemberi suara.

3. Definisi Partisipasi Politik Perempuan

Partisipasi politik perempuan adalah kegiatan warga negara perempuan untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik.

D. Definisi Operasional

Morissan (2015:75) mengungkapkan definisi operasional adalah hubungan antara konsep abstrak dengan dunia empiris atau batasan tegas gagasan abstrak agar dapat diamati dan diukur. Definisi operasional menjadikan variabel-variabel yang sedang diteliti menjadi bersifat operasional sehingga variabel-variabel tersebut dapat diukur.

Penelitian ini menggali lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan Kampung Bumi Dipasena Agung dalam Pilkada kabupaten Tulang Bawang dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Sosial Ekonomi

a. Pendapatan

Segala bentuk penghasilan yang diterima dalam bentuk rupiah setiap bulannya.

b. Jabatan Organisasi

Jabatan merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam rangka suatu satuan organisasi.

Pemeringkatan tiap item jabatan dilakukan dengan dasar pengakuan terhadap *power and authority* dalam Sudarsono (1990:23-24) yang menyatakan bahwa

pengakuan terhadap status seseorang sebagai akibat dimilikinya kewenangan atau *power and authority* yang melekat pada jabatan. Pemingkatan/pemberian skor jabatan diberikan sesuai hierarki jabatan.

2. Pendidikan

Pendidikan formal diartikan sebagai pengetahuan yang memiliki tahapan-tahapan atau jenjang, ditandai dengan ijazah terakhir yang dimiliki responden. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab VI, pasal 14 menyebutkan bahwa jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Adapun indikator jenjang pendidikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Tidak Sekolah

Tidak pernah sama sekali menegenyam pendidikan formal.

b. Jenjang Pendidikan Dasar:

SD atau yang sederajat.

c. Jenjang Pendidikan Menengah:

SLTP dan SLTA atau yang sederajat.

d. Jenjang pendidikan Tinggi:

Perguruan Tinggi atau yang sederajat.

3. Kinerja Pemerintah

a. Pelayanan publik

b. Pembangunan infrastruktur dan suprastruktur

c. Pembinaan

4. Citra Kandidat & Partai Politik

- a. Penampilan
- b. Latar belakang
- c. Karakter/kepemimpinan
- d. Kedekatan emosional
- e. Gaya berpolitik
- f. Partai pengusung

5. Partisipasi Politik

Tingkat partisipasi politik perempuan Kelurahan Dipasena Agung dalam Pemilihan Kepala Daerah Tulang Baang tahun 2017 dinilai berdasarkan keterlibatan atau keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dalam proses pemilihan Kepala Daerah. Adapun indikator partisipasi politik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Voting atau memberikan suara dalam pemilu.
- b. Mengikuti penghitungan suara.
- c. Donatur kampanye.
- d. Menjadi panitia dalam pemilihan kepala daerah.
- e. Menjadi tim sukses calon kepala daerah.

Berikut ini tabel definisi operasional beserta indikator dan skala pengukuran yang digunakan :

Tabel 5. Definisi Oprasional

Variabel	Definisi oprasional	Indikator	Skala
Variabel Independen X			
Sosial Ekonomi X ₁	Status atau kedudukan yang dimiliki responden dalam bermasyarakat.	1. Pendapatan <ul style="list-style-type: none"> • ≥ 5 juta/bulan • ≥ 4 juta/bulan • ≥ 3 juta/bulan • ≤ 2 juta/bulan • ≤ 1 juta/bulan 2. Jabatan <ul style="list-style-type: none"> • Ketua, kepala organisasi • Wakil Ketua organisasi • Sekretaris/ Bendahara organisasi • Staff/Anggota • Tidak ikut organisasi 	Skala Likert
Pendidikan X ₂	Pendidikan formal yang berhasil ditempuh responden, dilihat berdasarkan ijazah terakhir.	1. Tidak sekolah <ul style="list-style-type: none"> • Tidak pernah mengenyam pendidikan berdasarkan tahun tempuh. 2. Pendidikan dasar <ul style="list-style-type: none"> • SD atau sederajat lamanya tahun tempuh. 3. Pendidikan menengah <ul style="list-style-type: none"> • SLTP & SLTA atau sederajat berdasarkan tahun tempuh. 4. Pendidikan tinggi <ul style="list-style-type: none"> • Perguruan tinggi atau sederajat berdasarkan tahun tempuh. 	Skala Likert

Variabel	Definisi oprasional	Indikator	Skala
Kinerja Pemerintah X_3	Kinerja Pemerintah merupakan hasil kerja dari pelaksanaan fungsi-fungsi dan program kerja yang dirasakan oleh responden.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan publik 2. Pembangunan Infrastruktur & suprastruktur 3. Pembinaan 	Skala Likert
Citra Kandidat & Partai Politik X_4	Citra kandidat merupakan gaya personal kandidat calon kepala daerah yang ditangkap responden	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penampilan 2. Latar belakang 3. Prestasi 4. Karakter /Kepemimpinan 5. Kedekatan emosional 6. Gaya berpolitik 7. Partai pengusung 	Skala Likert
Variabel Dependen Y			
Partisipasi politik Y	Partisipasi politik merupakan kegiatan responden untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Voting 2. Ikut dalam proses penghitungan suara 3. Donatur kampanye 4. Menjadi panitia pemilu 5. Menjadi tim sukses 	Skala Likert

E. Lokasi Penelitian

Penetapan lokasi penelitian ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa partisipasi politik perempuan Kampung Bumi Dipasena Agung dalam Pemilukada Tulang Bawang 2017 sangat rendah, sehingga peneliti menetapkan lokasi penelitian di Kampung Bumi Dipasena Agung, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Bungin (2013:101) populasi merupakan keseluruhan (*universum*) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat dibedakan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penduduk berjenis kelamin perempuan Kampung Bumi Dipasena Agung yang terdaftar dalam DPT pada Pemilihan Kepala Daerah Tulang Baang tahun 2017. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari situs KPU, jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan Kampung Bumi Dipasena Agung yang terdaftar dalam DPT pada Pemilihan Kepala Daerah Tulang Baang tahun 2017 adalah 1.115 jiwa.

2. Sampel

Firdaus (2012:30) sampel adalah sebagian anggota populasi yang memiliki karakteristik populasi. Kesimpulan hasil penelitian sampel, dapat diberlakukan

untuk semua anggota populasi, dengan asumsi bahwa karakteristik yang dimiliki populasi benar-benar homogen. Rumus untuk mencari jumlah sampel:

$$n = \frac{N}{N(d^2) + 1}$$

n = Jumlah sampel yang dicari

N = Jumlah populasi

d = Nilai presisi atau yang ditentukan 0,10

Penghitungannya adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{1115}{1115(0,10)^2 + 1} = \frac{1115}{1115(0,01)+1} = \frac{1115}{12,15} = 91$$

Dari hasil perhitungan di atas maka didapat jumlah sampel yang digunakan dari 1.115 populasi adalah 91.

G. Jenis Data

Penelitian ini perlu didukung dengan data yang akurat dan lengkap, berikut ini jenis data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber asli atau pertama, dengan demikian maka peneliti mengumpulkan data primer menggunakan metode survei. Penelitian ini menggunakan data primer yang dihasilkan dari:

- a. Kuesioner : Disebar sebanyak 91 kuisisioner kepada perempuan yang terdaftar dalam DPT

- b. Wawancara : - Bapak Wanto (Skertaris Kampung Bumi Dipasena Agung)
- Iwan Kurniawan (Bendahara Kampung Bumi Dipasena Agung)

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan merupakan data yang sudah tersedia atau sudah diolah sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkan, dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah :

- a. Hasil pilkada serentak di Provinsi Lampung tahun 2017
- b. Hasil Pilkada serentak di Provinsi Lampung tahun 2015
- c. Katalog BPS SUSPAS 2015
- d. Duajurai.co edisi 14 Februari 2017 “Ini Tiga Pasangan Peserta pilkada Tulang Bawang 2017”
- e. Monografi Kampung Bmi Dipasena Agung

H. Teknik Pengumpulan Data

1. Kuesioner

Teknik pengumpulan data dengan kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan membuat rangkaian atau kumpulan pertanyaan yang disusun secara sistematis dalam sebuah daftar pertanyaan, yang selanjutnya dikirim kepada responden untuk diisi.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden yang diwawancarai.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-dokumen dan file, untuk menelusuri data secara historis.

I. Teknik Pengolahan Data

1. Editing

Editing merupakan proses dimana peneliti melakukan klarifikasi, keterbacaan, konsistensi, dan kelengkapan data yang telah terkumpul.

2. Koding

Koding dimaksudkan untuk menerjemahkan data ke dalam kode-kode, kode yang biasa digunakan adalah angka. Tujuan koding adalah untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data yang telah diperoleh.

3. Tabulating

Tabulasi merupakan kegiatan menggambarkan jawaban responden dengan cara tertentu dengan tujuan untuk mempermudah proses analisis data.

4. Interpretasi Data

Interpretasi data merupakan penyajian data dalam bentuk tabel, baik dalam tabel distribusi frekuensi maupun tabel silang yang nantinya dapat digunakan untuk penyajian data dalam penelitian.

J. Teknik Penentuan Skor

Teknik penentuan skor yang digunakan pada penelitian ini adalah skala Likert, Firdaus (2012:44) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena.

K. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji validitas dan uji reliabilitas digunakan untuk mendapatkan konsistensi dan keandalan data.

1. Uji Validitas Instrumen

Uji validitas mengacu pada seberapa jauh suatu ukuran empiris cukup menggambarkan arti sebenarnya dari konsep yang tengah diteliti.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan keandalan suatu hasil pengukuran.

Alpha Cronbachs Dibantu dengan program SPSS

$$a = \left[\frac{(k)}{(k - 1)} \right] \left[\frac{(1 - \sum S^2 y^1)}{(Sx - tot)} \right]$$

K = Jumlah Variabel

$\sum S^2 y^1$) = Jumlah varian belahan dalam tes $Sx - tot$ = Varian skor total

L. Teknik Analisis Data

1. Uji parsial

a. Uji Korelasi

Rumus Koefisien korelasi Pearson

$$r_{xy} = \frac{n \sum X_i - (\sum X_i)(\sum y_i)}{\sqrt{\{n \sum X_i - (\sum X_i)^2\} \{n \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2\}}}$$

r_{xy} = Nilai koefisien korelasi

x = Total skor untuk variabel bebas

y = total skor untuk variabel terikat

xy = Total skor untuk variabel x dan y

n = Jumlah responden

x^2 = Hasil perkalian total skor variabel bebas

y^2 = Hasil perkalian total skor variabel terikat

Setelah koefisien korelasi ditemukan maka akan diuji signifikansi hubungan, apakah hubungan yang ditemukan tersebut berlaku untuk semua populasi, digunakan rumus uji signifikansi korelasi *product moment* yaitu:

$$T = \frac{r_p \sqrt{n-3}}{\sqrt{1-r_p^2}}$$

r = koefisien korelasi parsial

n = jumlah sampel

a. Uji Regresi

Regresi digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel X dengan variabel Y, Adapun regresi linear berganda sebagai berikut :

$$\hat{Y} = a + bX_1 + bX_2 + bX_n$$

\hat{Y} = Nilai variabel bebas yang diramalkan

a = Konstanta bila harga $X=0$

b = Koefisien regresi dari x

X = Nilai variabel Independen

M. Uji Hipotesis

Untuk menguji apakah hipotesis diterima atau ditolak, maka digunakan uji t-test dengan rumus:

- Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $Sig. < 0,05$ maka H_A diterima dan H_0 ditolak.

Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara variabel bebas X dan variabel terikat Y.

- Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan $Sig. > 0,05$ maka H_A ditolak dan H_0 diterima.

Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh antara variabel bebas X dan variabel terikat Y.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Dipasena

Dipasena merupakan sebuah wilayah pertambakan udang terbesar di Asia Tenggara yang berada \pm 300 Km sebelah barat daya Kota Bandar Lampung. Dipasena awalnya masuk kedalam Kecamatan Menggala, Lampung Utara sebelum terjadi pemekaran wilayah, setelah pemekaran Dipasena menjadi kecamatan tersendiri yaitu Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang. Kawasan Dipasena dikelola oleh PT Dipasena Citra Darmaja yang didirikan pada tahun 1987. Perusahaan ekspor udang ini memiliki izin berdiri No 228/I/PMDN/1988 tanggal 1 April 1988.

Pada tahun 1980-an sebelum masuknya PT Dipasena Citra Darmaja, kawasan Dipasena merupakan kawasan rawa-rawa yang dipenuhi belukar dan pohon bakau, banyak hewan liar buas seperti buaya dan ular berbisa di wilayah tersebut. Sampai saat ini pun buaya-buaya tersebut masih banyak muncul ketika sore hari, bahkan sampai ada yang pernah memakan ternak dan menyerang warga. Pada 1987 sampai 1988 kawasan Dipasena yang dulunya tidak produktif tersebut mulai dibangun.

Pada Tahun 1990-an PT Dipasena Citra Darmaja menyertakan 9.033 petambak yang bertindak sebagai petani plasma, sementara perusahaan memiliki posisi

sebagai inti. Hubungan perusahaan ini dengan petambaknya menganut konsep kemitraan PIR, setiap petambak mendapat dua petak tambak yang masing masing seluas 2.000 M². Untuk membangun kawasan Dipasena perusahaan menanamkan investasi \$ 250 juta atau sekitar Rp 522 Miliar.

Kawasan ini dulunya hanya boleh dimasuki oleh orang-orang tertentu, dijaga dengan ketat peraturan yang serta sanksi bagi yang melanggar juga berlaku di wilayah ini. Untuk transportasi keluar dan masuk wilayah Dipasena, petambak hanya boleh menggunakan speedboat yang disediakan oleh Koprasi Windu Utama (KWU) jalur transportasinya ialah kanal sepanjang 20.000 KM yang juga berfungsi sebagai pengairan tambak. Transportasi lainya yang diperbolehkan di kawasan Dipasena hanyalah sepeda dan kendaraan pengangkut hasil panen itupun kebersihan dan kesterilannya harus terjaga.

Dipasena terdiri dari delapan kampung yaitu Bumi Dipasena Sentosa, Bumi Dipasena Utama, Bumi Dipasena Agung, Bumi Dipasena Jaya, Bumi Dipasena Mulia, Bumi Dipasena Makmur, Bumi Dipasena Sejahtera, dan Bumi Dipasena Abadi. Tiap kampung dibagi menjadi dua blok tambak, setiap bloknya dibagi lagi ke dalam subblok yang diberi nama Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, dan Golf. Tiap subblok terdiri dari 10 jalur dan tiap jalur dihuni oleh 10 petambak, dalam satu blok dihuni sekitar 600 orang petambak. Awalnya kepala kampung dipilih oleh manajemen Dipasena dari karyawan perusahaan, baru pada awal tahun 2000 kepala kampung dipilih oleh petambak melalui pemilihan langsung.

Dipasena merupakan industri udang yang mencakup pembibitan benur (bibit udang) dengan kapasitas 8 miliar ekor pertahunnya, pabrik pakan dengan

kapasitas 220 ribu ton pertahun, pabrik pengolahan udang 200 ton perhari, gudang penyimpanan udang beku (*cold storage*) berkapasitas 2.340 ton, dipasena juga memiliki dua kapal pengangkutan container dengan kapasitas 760 ton , serta enterpot produksi untuk tujuan ekspor. Untuk menunjang semua kebutuhan pabrik dan petambak, Dipasena memiliki pembangkit listrik bertenaga 160 MW.

Tambak udang Dipasena sangat berjaya dimasanya, tambak seluas 16.250 Ha itu pada tahun 1994 pernah mencapai total ekspor sebanyak 11.068 ton bahkan terus naik sampai tahun 1996 19.116 ton. Tujuan ekspor udang Dipasena adalah Jepang, AS, dan sejumlah negara-negara Eropa. Nilai ekspor tertinggi diperkirakan terjadi pada tahun 1995 sampai 1998 yaitu \$ 167 juta, atas keberhasilan ini Dipasena memperoleh penghargaan ekspor Primaniyarta yaitu penghargaan tertinggi yang diberikan pemerintah Indonesia kepada eksportir Indonesia, Dipasena juga menjadi badan usaha pembayar pajak penghasilan (PPH) tertinggi di Provinsi Lampung.

B. Kondisi Geografis

Kampung Dipasena Agung memiliki luas 2.404 Ha, luas wilayah tersebut terdiri dari kanal, tambak, dan pemukiman penduduk dengan lahan gambut. Kondisi geografis Kampung Dipasena Agung merupakan daerah pesisir dengan rawa-rawa sehingga ketinggian datarannya hanya berkisar 100-200 Mdpl, dengan curah hujan 2000 – 3000 mm/ph dan suhu udara rata-rata setiap tahunnya adalah 32°C. Luasan wilayah Kampung Dipasena Agung yang terdapat banyak kanal dan merupakan lahan gambut berdampak terhadap sarana penghubung desa yaitu penggunaan *speedboat* dan klotok. Jalanan selebar 0,5 – 1 meter membentang

sepanjang 7,5 km namun hanya 20% yang berupa semen sisanya masih berupa tanah, terdapat juga 78 jembatan penghubung berkerangka besi dengan alas papan dengan lebar ± 100 cm sehingga hanya dapat dilalui sepeda dan motor.

Kampung Dipasena Agung juga belum dapat menggunakan listrik yang disediakan PLN sehingga masih menggunakan panel surya dan diesel. Dipasena memang pernah memiliki pembangkit listrik bertenaga 160 MW namun tidak lagi beroperasi pasca konflik. Masyarakat Kampung Dipasena Agung sebelumnya telah bergotong royong untuk memasang tiang listrik yang disediakan pihak PLN, namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut. Batas-batas wilayah Kampung Dipasena Agung adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Bumi Dipasena Jaya.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Bumi Dipasena Utama.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Gedung Karyajitu.
4. Sebelah Timur Berbatasan dengan Laut Jawa.

Orbitasi atau jarak Kampung Dipasena Agung dari pusat pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Jarak Kampung Dipasena Agung dari pusat pemerintahan Kecamatan Rawajitu Timur adalah 9 Km.
2. Jarak Kampung Dipasena Agung dari Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II adalah 126 Km.
3. Jarak Kampung Dipasena Agung dari Ibu Kota Privinsi Daerah Tingkat I adalah 316 Km.
4. Jarak Kampung Dipasena Agung dari Ibu Kota Negara adalah 526 Km.

C. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kampung Bumi Dipasena Agung pada tahun 2017 sesuai dengan data monografi kampung adalah sebesar 2152 orang yang terdiri dari 614 kk (kepala keluarga). Kondisi demografi Kampung Bumi Dipasena Agung dapat dilihat lebih jelas dan terperinci di bawah ini dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin, agama, jenjang pendidikan, dan usia yang disajikan ke dalam tabel.

1. Distribusi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambaran penduduk Kampung Bumi Dipasena Agung berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat lebih jelas pada tabel di bawah ini:

Tabel 6. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	1143	53,1
2.	Perempuan	1009	46,9
Total		2152	100

(Sumber: Monografi Kampung Dipasena Agung tahun 2017)

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kampung Bumi Dipasena Agung adalah 2152 orang yang terdiri dari 1143 orang berjenis kelamin laki-laki atau 53,1% dari populasi dan 1009 orang berjenis kelamin perempuan atau 46,9% dari populasi.

2. Distribusi Penduduk Berdasarkan Agama

Kampung Bumi Dipasena Agung merupakan wilayah yang kaya dengan kemajemukan suku dan agama masyarakatnya. Masyarakat Kampung Bumi

Dipasena Agung terdiri dari 5 pemeluk agama, yaitu Budha, Hindu, Islam, Katolik, dan Protestan. Gambaran penduduk Kampung Bumi Dipasena Agung berdasarkan agama dapat dilihat lebih jelas pada tabel dibawah ini:

Tabel 7. Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama

No.	Agama	Jumlah	Persentase (%)
1.	Budha	2	0,1
2.	Hindu	37	1,7
3.	Islam	2022	94,0
4.	Katolik	66	3,1
5.	Kristen	25	1,2
Total		2152	100

(Sumber: Monografi Kampung Dipasena Agung tahun 2017)

Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui bahwa masyarakat Kampung Bumi Dipasena Agung merupakan kampung dengan masyarakat yang majemuk dalam beragama. Jumlah penduduk beragama Budha 2 orang (0,1%), Hindu 37 orang (1,3%), Katolik 66 orang (3,1%), Kristen 25 orang (1,2%), dan sebagian besar penduduk Kampung Bumi Dipasena Agung beragama Islam dengan jumlah 2022 orang atau 94%. Meski beberapa agama lain tidak terlalu banyak tetapi tidak pernah terjadi konflik antar umat beragama di Kampung Bumi Dipasena Agung, menurut responden hal ini di karenakan masyarakat dengan jumlah mayoritas menghargai masyarakat lainnya yang berbeda agama.

3. Distribusi Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Gambaran penduduk Kampung Bumi Dipasena Agung berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat lebih jelas pada tabel dibawah ini:

Tabel 8. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Tidak Sekolah	127	5,9
2.	Taman Kanak-kanak	77	3,6
3.	Sekolah Dasar	291	13,5
4.	SLTP	722	33,6
5.	SLTA	859	39,9
6.	Diploma 1	12	0,6
7.	Diploma 2	18	0,8
8.	Diploma 3	20	0,9
9.	Sarjana	26	1,2
Total		2152	100

(Sumber: Monografi Kampung Dipasena Agung tahun 2017)

Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui bahwa penduduk Kampung Bumi Dipasena Agung telah mengenyam pendidikan dalam berbagai jenjang dan ada pula yang telah mengenyam pendidikan jenjang perguruan tinggi yaitu Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, dan Sarjana. Sebagian besar masyarakat telah menempuh pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau SLTA.

4. Distribusi Penduduk Menurut Kelompok Usia

Pengelompokan usia penduduk dilakukan untuk mempermudah memahami data kependudukan, dengan pengelompokan data informasi tentang jumlah penduduk bayi, balita, usia sekolah, usia produktif, dan usia senja dapat diketahui lebih mudah. Dengan adanya pengelompokan usia penduduk,

pemerinta dapat terbantu dalam merencanakan dan membuat kebijakan yang tepat sasaran. Gambaran penduduk Kampung Bumi Dipasena Agung berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat lebih jelas pada tabel berikut ini:

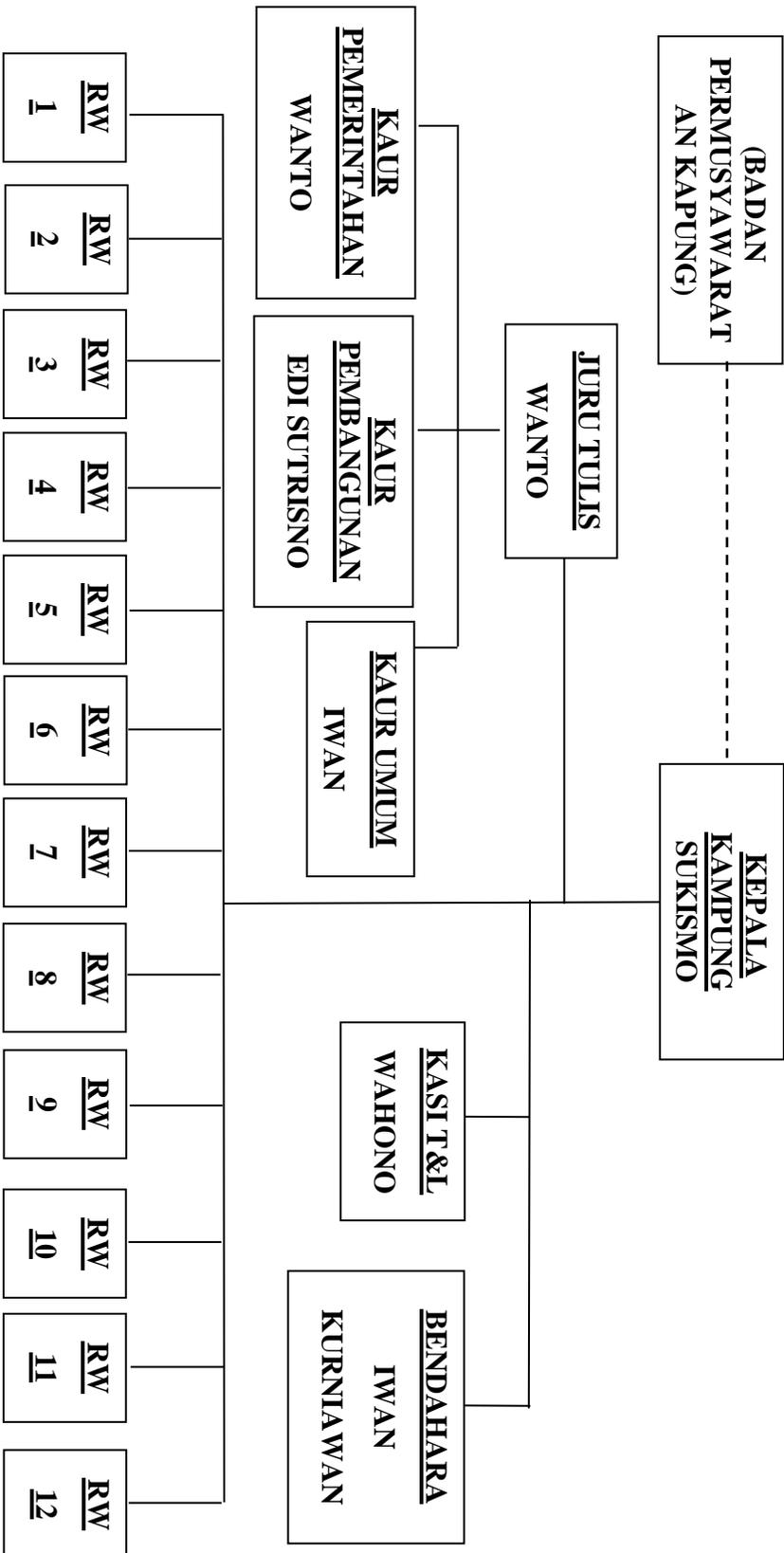
Tabel 9. Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia

No.	Usia (tahun)	Jumlah	Persentase (%)
1.	0 – 4	127	5,9
2.	5 – 10	79	3,7
3.	11 – 16	391	18,2
4.	17 – 20	142	6,6
5.	21 – 25	659	30,6
6.	26 – 30	112	5,2
7.	31 – 35	133	6,2
8.	36 – 40	153	7,1
9.	41 – 45	79	3,7
10.	46 – 50	85	3,9
11.	51 – 55	65	3,0
12.	56 – 60	69	3,2
13.	>60	58	2,7
Total		2152	100

(Sumber: Monografi Kampung Dipasena Agung tahun 2017)

Berdasarkan tabel 9 dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk Kampung Bumi Dipasena Agung berada pada kelompok usia 17-40 tahun.

D. Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung Bumi Dipasena Agung Tahun 2017



Gambar 4
Bagan Struktur Organisasi Kampung Bumi
Dipasena Agung

A. Kandidat Calon Kepala Daerah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tulang Bawang 2017

Berikut ini adalah nama pasangan kandidat calon kepala daerah beserta daftar partai pengusung dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tulang Bawang 2017.

Tabel 10. Daftar Nama Calon Kepala Daerah Beserta Partai Pengusung Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tulang Bawang 2017

No	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah	Partai Pengusung
1.	Hi. Syarnubi, S.Pd.,M.H. Hj. Solihah, S.Pd.I.	Perseorangan
2.	Ir. Hanan A. Rozak, M.S. Heri Wardoyo, S.H.	<ul style="list-style-type: none"> • Partai Persatuan Pembangunan (PPP) • Partai Gerindra • Partai Hanura • Partai Golkar • Partai Keadilan Sejahtera (PKS) • Partai NasDem • Partai Demokrat • Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
3.	Hj. Winarti,S.E.,M.H. Hendriwansyah	<ul style="list-style-type: none"> • PDI Perjuangan • Partai Amanat Nasional (PAN)

(Sumber: *duajurai.com* edisi 14 Februari 2017)

B. Hasil Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah Tulang Bawang 2017

Tabel 11. Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tulang Bawang 2017

No	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah	Jumlah Suara	Persentase (%)
1.	Hi. Syarnubi, S.Pd.,M.H. Hj. Solihah, S.Pd.I.	14.174	7.2
2.	Ir. Hanan A. Rozak, M.S. Heri Wardoyo, S.H.	88.762	45.1
3.	Hj. Winarti,S.E.,M.H. Hendriwansyah	93.689	47.6
Total		196.625	100

(Sumber: *pilkada2017.kpu.go.id*)

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Faktor sosial ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi politik perempuan Kampung Bumi Dipasena Agung pada Pemilihan Kepala Daerah Tulang Bawang tahun 2017. Korelasi faktor sosial ekonomi dengan partisipasi politik perempuan sebesar 0,274, nilai koefisien regresi faktor sosial ekonomi 0,457 dengan signifikansi 0,020. Artinya terdapat korelasi faktor sosial ekonomi dengan partisipasi politik perempuan dan setiap kenaikan satu satuan faktor sosial ekonomi maka akan menaikkan partisipasi politik perempuan sebesar 0,457.
2. Faktor pendidikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi politik perempuan Kampung Bumi Dipasena Agung pada Pemilihan Kepala Daerah Tulang Bawang tahun 2017. Korelasi faktor pendidikan dengan partisipasi politik perempuan sebesar -0,003, nilai koefisien regresi faktor pendidikan -0,015 dengan signifikansi 0,936. Artinya tidak terdapat korelasi faktor pendidikan dengan partisipasi politik perempuan dan setiap kenaikan satu satuan faktor pendidikan maka akan menurunkan partisipasi politik perempuan sebesar -0,015.

3. Faktor kinerja pemerintah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi politik perempuan Kampung Bumi Dipasena Agung pada Pemilihan Kepala Daerah Tulang Bawang tahun 2017. Korelasi faktor kinerja pemerintah dengan partisipasi politik perempuan sebesar 0,009, nilai koefisien regresi faktor kinerja pemerintah -0,039 dengan signifikansi 0,787. Artinya terdapat korelasi yang lemah antara faktor kinerja pemerintah dengan partisipasi politik perempuan dan setiap kenaikan satu satuan faktor kinerja pemerintah maka akan menurunkan partisipasi politik perempuan sebesar -0,039.
4. Faktor citra calon dan partai politik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi politik perempuan Kampung Bumi Dipasena Agung pada Pemilihan Kepala Daerah Tulang Bawang tahun 2017. Korelasi citra calon dan partai politik dengan partisipasi politik perempuan sebesar 0,305, nilai koefisien regresi faktor citra calon dan partai politik sebesar 0,227 dengan signifikansi 0,008. Artinya terdapat korelasi faktor citra calon dan partai politik dengan partisipasi politik perempuan dan setiap kenaikan satu satuan faktor citra calon maka akan menaikkan partisipasi politik perempuan sebesar 0,227.

Nilai koefisien determinasi faktor sosial ekonomi, faktor pendidikan, faktor kinerja pemerintah serta faktor citra calon dan partai politik adalah sebesar 0,154. Artinya faktor sosial ekonomi, faktor pendidikan, faktor kinerja pemerintah serta faktor citra calon dan partai politik berpengaruh sebesar 15,4% terhadap partisipasi politik perempuan Kampung Bumi Dipasena.

Meskipun nilai pengaruhnya kecil namun pengaruh tersebut signifikan dan bersifat berbanding lurus artinya setiap kenaikan variabel X diikuti oleh kenaikan variabel Y dengan asumsi variabel lain bernilai tetap. Selain itu ditemukan beberapa faktor lain yang berpengaruh terhadap rendahnya partisipasi politik perempuan Kampung Bumi Dipasena Agung dalam Pemilihan Kepala Daerah Tulang Bawang tahun 2017, yaitu konflik petambak dengan PT Dipasena Darmaja dan faktor teknis seperti jarak yang cukup jauh ke TPS, serta permasalahan DPT dan EKTP.

Hasil penelitian ini hanya berlaku di Kampung Bumi Dipasena Agung pada tahun 2017, untuk lokasi dan waktu yang berbeda kemungkinan diperoleh hasil yang berbeda karena dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat.

B. Saran

Dengan adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, kepada peneliti lain diharapkan dapat melakukan penelitian sejenis lebih lanjut dengan menggunakan variabel yang lebih banyak, mengambil wilayah penelitian yang lebih luas, sampel yang lebih banyak dan menggunakan rancangan penelitian yang lebih kompleks, sehingga dapat ditemukan hasil yang lebih optimal dan dapat digeneralisasikan pada wilayah yang lebih luas

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Andrews, Colin Mac. 1995. *Masalah Masalah pembangunan Politik*. Diterjemahkan oleh : Yahya Muhaimin. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Arifin, Anwar. 2014. *Politik Pencitraan-Pencitraan Politik*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Budiardjo, Miriam. 1982. *Partisipasi dan Partai Politik. Sebuah Bunga Rampai* Yayasan Obor. Jakarta.

_____. 2007. *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Cahyono, Cheppy Hari. 1991. *Ilmu Politik Dan Perspektifnya*. Tiara Wacana Yogya. Yogyakarta.

Cantor, Dorothy W. dkk. 1998. *Woman In Power Kiprah Wanita Dalam Dunia Politik*. Diterjemahkan oleh : Abraham Rap. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Dahl, Robert. 1994. *Analisis Politik Modern*. Bumi Aksara. Jakarta.

Efriza. 2012. *Political Explore Sebuah Kajian Ilmu*. Alfabeta. Jakarta.

Fadilasari. 2012. *Dipasena Kemitraan, Konflik, dan Perlawanan Petani Udang*. Sijado. Bandar Lampung

Hoogerwerf, A. 1985. *Politikologi*. Erlangga. Jakarta

Ihromi, Tapi Omas. dkk. 2000. *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Alumni. Bandung.

Ihsan, H. Fuad. 1996. *Dasar Dasar Kependidikan*. Rineka Cipta . Jakarta

- Jurdi, Fatahullah. 2014. *Studi Ilmu Politik*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Morrisan. 2015. *Metode Penelitian Survei*. Kencana. Jakarta.
- Munandar, Haris. 1994. *Pembangunan Politik, Situasi Global, Dan Hak Asasi Di Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Ridjal, Fauzie. dkk. 1993. *Dinamika Gerakan Perempuan Di Indonesia*. PT. Tiara Wacana Yogya. Yogyakarta
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Sastrodmodjo, Sudijono. 1995. *Prilaku Politik*. IKIP Semarang Press. Semarang
- Sukbiakto, Henry dan Rachmah Ida. 2012. *Komunikasi Politik, Media & Demokrasi*. Kencana. Jakarta
- Suwarno. 2012. *Teori Sosiologi Sebuah Pemikiran Awal*. Universitas Lampung. Bandar Lampung
- Zaman, Rambe Kamarul. 2016. *Perjalanan Panjang Pilkada Serentak*. PT. Mizan Publika. Jakarta.

Jurnal :

- Siregar, Amir Efendi, dkk. 2009. *Jurnal Sosial Demokrasi Representasi Politik Perempuan: Sekedar Ada Atau Pemberi Warna*. Pergerakan Indonesia Dan Komite Persiapan Yayasan Indonesia Kita. Vol. 6, Tahun 2. <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/07003/jurnal%20edisi%206%20kirim.pdf>. (diakses pada 08 Maret 2017).
- Subiantoro. 2014. *Jurnal Translitera : Dinamika Kesetaraan Gender Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia*.
- Sudarsono, FX. 1990. *Jurnal Populasi : Pengukuran Status Sosial Ekonomi dan Permasalahannya*. <https://journal.ugm.ac.id/populasi/article/view/10733/8050> (diakses pada 07 Oktober 2017)
- Treiman, Donald J. and Peter H. Rossi. 1977. *Occupational Prestige in Comparative Perspective-Academic Press*. <http://download.libgen.io/get/51543E067C5747297850112834D655B6>

/Donald%20J.%20
Treiman%20and%20Peter%20H.%20Rossi%20%28Auth.%29Occupational%20
Prestige%20in%20Comparative%20Perspective-
Academic%20Press%20%281977%29.pdf (diakses pada 09 Oktober 2017)

Dokumen :

Katalog BPS 2101014. 2015. *Penduduk Indonesia Hasil Survei Penduduk Antar Sensus 2015*. Badan Pusat Statistik. <http://www.bps.go.id>.

<https://pilkada2015.kpu.go.id/> (diakses pada 20 Februari 2017)

<https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil> (diakses pada 20 Februari 2017)

<http://duajurai.co/2017/02/14/ini-3-pasangan-peserta-pilkada-tulangbawang-2017> (diakses pada 16 Agustus 2017)

<https://ilafadilasari.wordpress.com/2013/07/22/dipasena-potret-buram-pola-kemitraan/> (diakses pada 9 September 2017)